



# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023**

**KECAMATAN TEMBELANG  
KABUPATEN JOMBANG**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sebagaimana Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Tembelang, 07 Mei 2024

CAMAT TEMBELANG



**AGUS SANTOSO, S.Sos**

Pembina Tingkat I

NIP. 197303291992011001

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| Kata Pengantar .....                           | 1  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                         | 3  |
| 1.1 Struktur Organisasi .....                  | 4  |
| 1.2 Tugas dan Fungsi.....                      | 9  |
| 1.3 Isu Strategis.....                         | 10 |
| 1.4 Cascading Kinerja.....                     | 13 |
| 1.5 Peta Proses Bisnis.....                    | 14 |
| 1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi.....      | 14 |
| <br>   |    |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA.....                | 18 |
| 2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja..... | 18 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja.....                    | 22 |
| <br>   |    |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....             | 37 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....            | 38 |
| 3.2 Realisasi Anggaran.....                    | 62 |
| 3.3 Upaya Perbaikan Kinerja.....               | 70 |
| 3.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi .....         | 73 |
| <br>   |    |
| BAB IV PENUTUP                                 |    |
| 4.1 Kesimpulan.....                            | 75 |
| 4.2 Saran Perbaikan.....                       | 76 |
| <br>   |    |
| DOKUMEN.....                                   |    |

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Tembelang sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Tembelang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Tembelang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1. 1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

### 1. Camat

Kantor Kecamatan Tembelang dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### 2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;

- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
  - b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
  - c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
  - d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
  - e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
  - f. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
  - g. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
  - h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
  - i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
  - j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### 3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);

- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;

- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

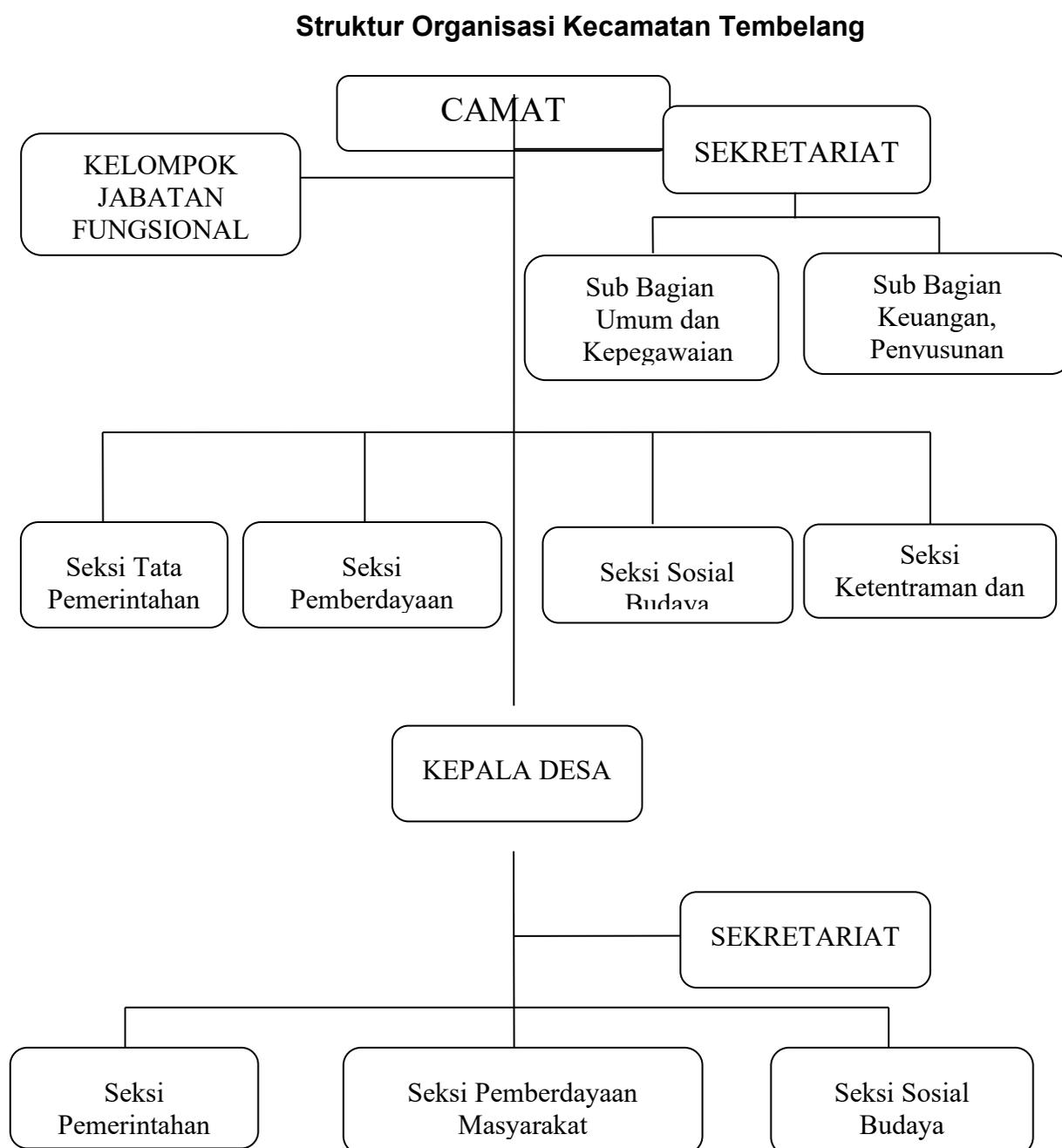
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Tembelang tersaji dalam Gambar 1.2.

Gambar 1.2  
Struktur Organisasi Kecamatan Tembelang



Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019

## 1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

### 1.3 Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan publik.
3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (*service excelent*) harus diimbangi dengan citra organisasi dengan kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber Daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Goverment*, mewujudkan budaya kerja aparatur dengan penekanan kepada semangat kerja serta aparatur sebagai "*pelayanan masyarakat*".

Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Tembelang juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

#### 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya *Good Goverment* di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep *Valur For Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

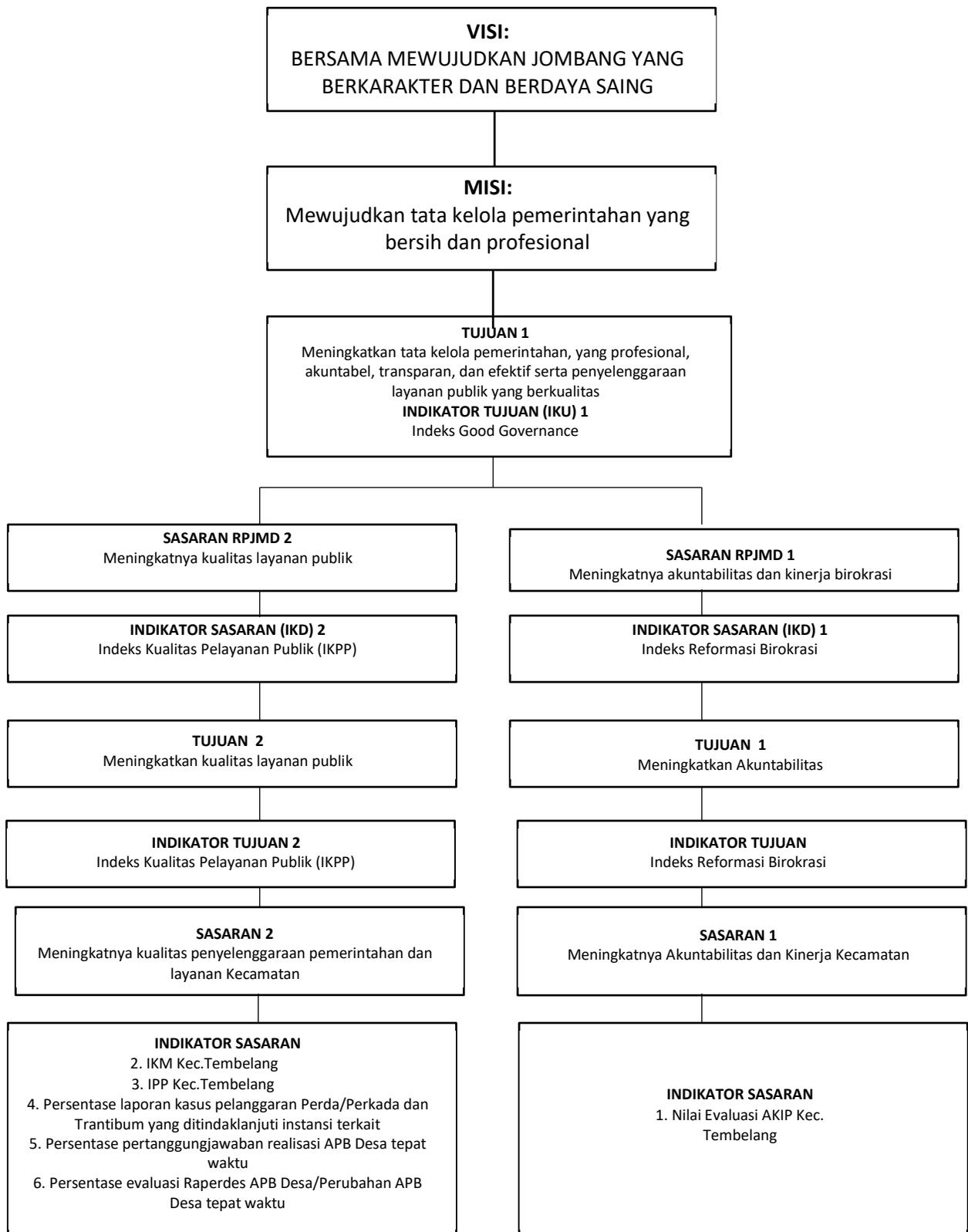
5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.
6. Kecamatan Tembelang merupakan kawasan dengan tipologi pertanian menuju pengembangan wilayah industri. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

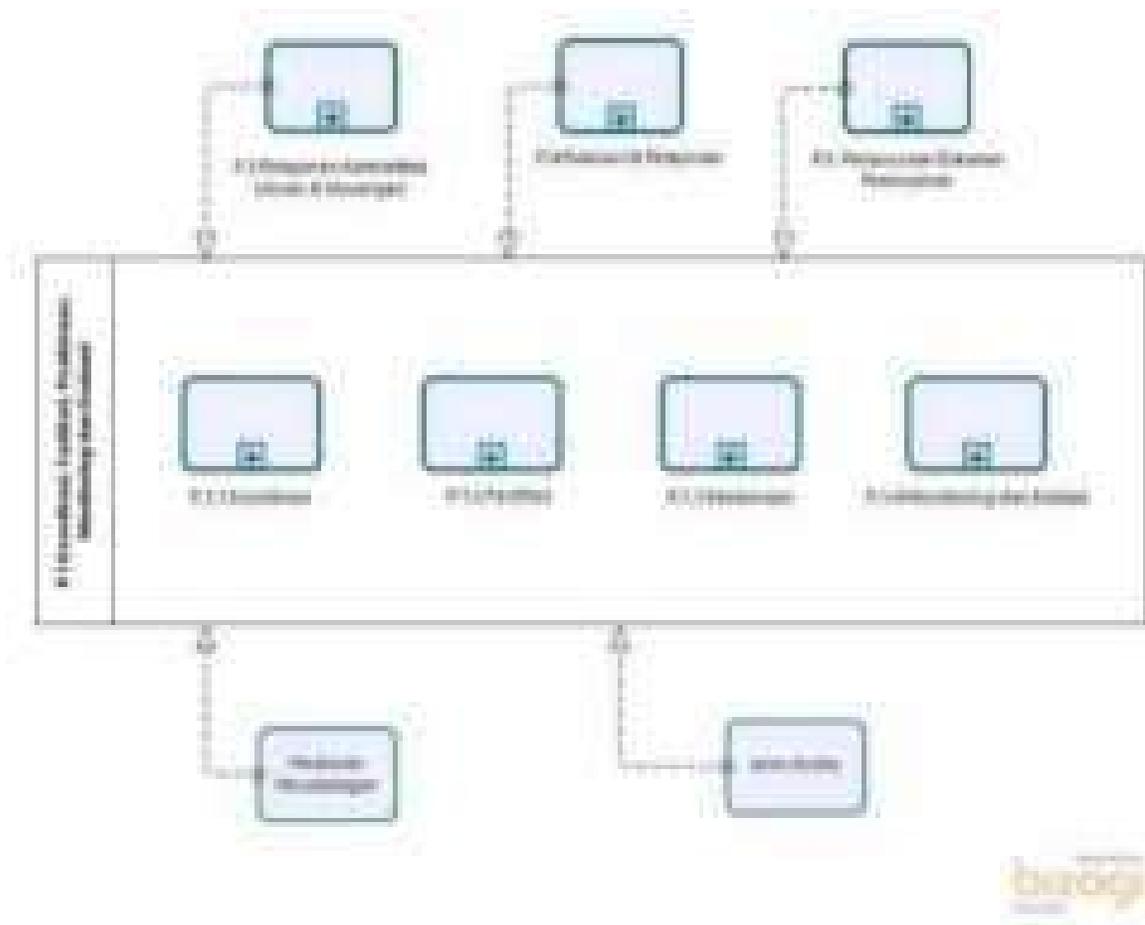
1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Tembelang menjadikan kebutuhan Kecamatan Tembelang belum bisa terakomodasi seluruhnya;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Tembelang masih terbatas;
4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

#### 1. 4 Cascading Kinerja

Visi dan Misi Bupati serta Tujuan dan Sasaran RPJMD telah dijabarkan dan diseleraskan dalam bentuk dokumen cascading keterkaitan tujuan dan sasaran kecamatan dengan tujuan dan sasaran antara RPJMD yang menunjang tercapainya visi dan misi Bupati, sebagai berikut:



### 1. 5 Peta Proses Bisnis



Proses Bisnis Utama di Kecamatan P.1 Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam gambar di atas dapat dijelaskan bahwa core utama dalam poin P.1 terdapat Core dibawahnya yaitu Core Koordinasi yang mencakup proses bisnis tentang koordinasi antar kabupaten dengan kecamatan dan turun ke desa, Core Fasilitasi mencakup kegiatan fasilitasi program/kegiatan kabupaten kepada desa/masyarakat, core Pembinaan mencakup kegiatan pembinaan kapasitas aparatur desa, core monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pemerintah kabupaten yang di amanatkan ke pemerintah desa. Dari keseluruhan Core tersebut terdapat variabel yang dapat mempengaruhi proses bisnis tersebut di antaranya variabel peraturan Perundang-undangan dan Iklim Politik.

### 1. 5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP X.700/578/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023, Kecamatan Tembelang memperoleh nilai 72,99 dengan predikat BB (Sangat Baik) dengan catatan hasil reuiu sebagai berikut:

## 1. Evaluasi dan Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 25,34 dari bobot 30% atau dengan capai 84,46% (BB) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas kriteria telah terpenuhi seluruhnya (100%) sesuai dengan mandat kebijakan. Namun masih terdapat catatan yang perlu diperhatikan yaitu pada :

- a. Target pada indikator sasaran Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada Kecamatan Tembelang kurang realitis. Indeks Pelayanan Publik (IPP) tiap tahunnya mempunyai target tinggi (tahun 2021 dengan target 3,4 dan tahun 2022 dengan target 3,45) jauh di bawah target serta mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 dengan point 2,883.
- b. Semua pegawai telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), namun berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Kabupaten Jombang, belum seluruhnya pegawai mampu memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

## 2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 21,92 dari bobot 30% atau dengan mencapai 73,06% (B) yang berarti bahwa kualitas kinerja sebagian besar terpenuhi (>75%-100%) dan masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/penguraangan) tunjangan kinerja/penghasilan sebagaimana penggunaan aplikasi TPP melalui e-office kabupaten, namun berdasarkan rekapitulasi penilaian kinerja pegawai yang dilampirkan dalam rangka pemberian reward dan punishment tidak didapati dasar perhitungan yang jelas pada indikator Nilai Sinergitas dan Disiplin Kerja.
- b. Berdasarkan Survey dari Organisasi Kabupaten Jombang didapati bahwa pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi tindaklanjut unit kerja terhadap pembenahan yang harus dilakukan.
- c. Setiap ASN telah membuat SKP mulai dari Pimpinan Tertinggi samapi dengan staf, namun berdasarkan survey dari Organisasi Kabupaten Jombang didapati bahwa pegawai pada unit kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

### 3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 6,89 dari bobot 15% atau dengan capaian 45,95% (D) yang berarti bahwa kualitas kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai terpenuhi (>25%-50%) dan terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- a. Penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja namun belum memenuhi kualitas kriteria yang ditetapkan yaitu belum menyajikan efisiensi sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana, hanya menyajikan efisiensi sumber daya keuangan/anggaran
- b. Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan secara rinci dan selaras terhadap upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja atas hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja.
- c. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk dasar dilakukan penyesuaian anggaran, karena dalam penyesuaian anggaran hanya didasarkan pada adanya kebijakan dari pemerintah. Sedangkan adanya target kinerja yang telah tercapai di awal tidak dijadikan dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran.

### 4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 18,84 dari bobot 25% atau dengan capaian 75,38 (B) yang berarti bahwa kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%), namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai, karena seluruh tim evaluasi internal belum mendapatkan bimbingan teknis evaluasi SAKIP, evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
- b. Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja pada poin perencanaan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.
- c. Informasi mengenai kinerja belum memenuhi kriteria sebagai informasi yang andal, yaitu belum memenuhi kriteria

berdasarkan sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten). Pada dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Tembelang belum menjelaskan sumber data yang valid terhadap tabel-tabel capaian kinerja. Selain itu juga belum memenuhi kriteria dapat diverifikasi, yakni bukti pendukung pada dokumen Monev Renaksi Tribula I 2023 belum sepenuhnya menggambarkan tindak lanjut yang dilakukan Kecamatan Tembelang dalam mencapai kinerja.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

#### 2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana

penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Tembelang pada periode Tahun 2018-2023.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tembelang adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaran Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan

Subkegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Subkegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

#### 2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Rencana Kerja tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2023 sebagaimana terlampir.

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Tembelang atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Tembelang Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Tembelang Tahun 2018-2023, dokumen Kertas Kerja Penetapan Target (KKTP) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Tembelang untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1  
PERJANJIAN KINERJA  
KECAMATAN TEMBELANG TAHUN 2023

| NO. | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET     |
|-----|--|---|------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)        |
| 1.  | Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan                         | 1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Tembelang  | BB (72,01) |
| 22. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan | 2. IKM Kecamatan Tembelang  | 88,85      |
|     |  | 3. IPP Kecamatan Tembelang  | 3,50       |
|     |  | 4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait | 100%       |
|     |  | 5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu   | 100%       |
|     |  | 6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu                                   | 100%       |

| NO.           | SASARAN PROGRAM  | PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM   | TARGET TAHUNAN | ANGGARAN (Rp)        |
|---------------|--|---|---|----------------|----------------------|
| (1)           | (2)  | (3)   | (4)   | (5)            | (10)                 |
| 1.            | Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Nilai Paten Kecamatan   | 81             | 2.100.000            |
| 2.            | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa                                     | 100%           | 3.500.000            |
|               |  |   | Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti           | 100%           |                      |
| 3.            | Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait | 100%           | 28.850.000           |
| 4.            | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan        | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi  | 100%           | 40.594.000           |
|               |  |   | Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif                              | 30 lembaga     |                      |
| 5.            | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan  | 100%           | 22.655.000           |
|               |  |   | Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti   | 100%           |                      |
| 6.            | Meningkatnya capaian kinerja aparatur                          | Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur   | 100%           | 2.755.553.535        |
| <b>Jumlah</b> |  |   |   |                | <b>2.853.252.535</b> |

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Tembelang dengan Pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama

| No | Kinerja Utama  | Indikator kinerja utama   | Rumus penghitungan/formula  | Sumber Data  | Penanggung jawab |
|----|--|---|---|--|------------------|
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan                         | Nilai Evaluasi AKIP   | Nilai Evaluasi AKIP tahun n   | Hasil Evaluasi SAKIP Kec. Tembelang  | Camat Tembelang  |
| 2  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tembelang  | IKM Kecamatan Tembelang tahun n   | Hasil Survey IKM Kec. Tembelang  | Camat Tembelang  |
|    |  | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Tembelang   | IPP Kecamatan Tembelang tahun n   | Hasil Survey IPP Kec. Tembelang  | Camat Tembelang  |
|    |  | Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait | Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang tindaklanjuti PD/instansi terkait<br>----- X 100 %<br>Jumlah laporan kasus pelanggaran perda/Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait | Laporan kasus Pelanggaran Perda dan Trantibum                              | Camat Tembelang  |
|    |  | Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu  | Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu<br>-----X 100 %<br>Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa  | Laporan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Desa tahunan | Camat Tembelang  |
|    |  | Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu  | Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa tepat waktu<br>----- X 100 %<br>Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa   | Laporan Evaluasi Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa                  | Camat Tembelang  |

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Tembelang telah dirumuskan Indikator Program, Indikator.

Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan,  
Sasaran Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  | SASARAN  | INDIKATOR  | TARGET    | FORMULASI  |
|----|--|--|--|-----------|--|
|    | Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota                            | Meningkatnya capaian kinerja aparatur  | Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur  | 100%      | Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd<br>-----x100<br>jumlah pegawai   |
|    | Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan   | 100%      | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan<br>-----x100<br>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan |
|    | Sub Kegiatan :<br>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun  | 3 dokumen | Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n  |
|    | 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 dokumen | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tahun n                 |

|  |  | Kinerja SKPD  |   |           |   |
|--|--|---|---|-----------|---|
|  | Kegiatan:<br>Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                       | Terlaksananya<br>Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                            | 1. Persentase pencairan<br>gaji dan tunjangan ASN<br>tepat waktu  | 100%      | Realisasi pencairan gaji dan<br>tunjangan ASN tepat waktu<br>-----x100<br>Anggaran gaji dan tunjangan ASN<br>yang ditargetkan       |
|  |  |   | 2. Persentase laporan<br>keuangan yang tersusun<br>sesuai aturan  | 100%      | Jumlah laporan keuangan yang<br>tersusun sesuai aturan<br>-----x100<br>Jumlah Laporan keuangan yang<br>ditargetkan                  |
|  | Sub Kegiatan :<br>1. Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                    | Terlaksananya<br>pembayaran gaji dan<br>tunjangan ASN                                 | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN difasilitasi  | 16 orang  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji<br>dan Tunjangan ASN tahun n  |
|  | 2. Pelaksanaan<br>penatausahaan dan<br>pengujian/verifikasi<br>keuangan SKPD | Terlaksananya<br>penatausahaan dan<br>pengujian/verifikasi<br>keuangan SKPD           | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD  | 12 kali   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>tahun n   |
|  | 3. Koordinasi dan penyusunan<br>laporan keuangan akhir tahun<br>SKPD         | Terlaksananya<br>koordinasi dan<br>penyusunan laporan<br>keuangan akhir tahun<br>SKPD | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD | 1 dokumen | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun n |
|  | Kegiatan:<br>Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                    | Terlaksananya<br>Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                      | Persentase pemenuhan<br>administrasi<br>kepegawaian PD<br>Kecamatan<br>Tembelang  | 100%      | Jumlah pemenuhan pelayanan<br>administrasi kepegawaian<br>-----x100<br>Pelayanan administrasi kepegawaian<br>yang ditargetkan       |
|  | Sub Kegiatan :<br>1. Pengadaan pakaian dinas                                 | Tersedianya pakaian   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas Beserta Atribut   | 0 stel    | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta<br>Atribut Kelengkapan   |

|  |  |   |  |           |   |
|--|--|---|--|-----------|---|
|  | beserta atribut kelengkapannya   | dinas beserta atribut kelengkapannya                                | kelengkapan  |           | tahun n   |
|  | Kegiatan:<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                     | Terlaksananya<br>Administrasi umum<br>Perangkat Daerah              | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                            | 100%      | Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran<br>-----x100<br>Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan |
|  | Sub Kegiatan :<br>1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. | Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 7 paket   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tahun n                              |
|  | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 56 paket  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tahun n  |
|  | 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Tersedianya bahan logistik kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 paket   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan tahun n  |
|  | 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Tersedianya barang cetak dan penggandaan                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2 paket   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan tahun n   |
|  | 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                            | Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 jenis   | jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan tahun n                                    |
|  | 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                | Terselenggaranya rapat koordinasi dan                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 4 laporan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun n   |

|  |   |  |  |            |  |
|--|---|--|--|------------|--|
|  |   | konsultasi SKPD  |  |            |  |
|  | Kegiatan:<br>Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah           | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur                           | 100%       | Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana<br>-----x100<br>Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan                                      |
|  | Sub Kegiatan :<br>1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 7 unit     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan tahun n   |
|  | Kegiatan:<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                           | 100%       | Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah<br>-----x100<br>Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan |
|  | Sub Kegiatan:<br>1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik              | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tahun n   |
|  | 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Tersedianya jasa umum pelayanan kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 25 laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tahun n   |

|  |  |   |  |          |  |
|--|--|---|--|----------|--|
|  | Kegiatan:<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah                     | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik  | 100%     | Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik<br>-----x100<br>Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara      |
|  | Sub Kegiatan:<br>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 unit   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya tahun n |
|  | 2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 gedung | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tahun n                               |
|  | 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya       | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 18 unit  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tahun n         |

|  |  |  |   |            |   |
|--|--|--|---|------------|---|
|  | Program:<br>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  | Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik   | Nilai Paten Kecamatan   | 81         | Nilai PATEN Kecamatan Tembelang Tahun n   |
|  | Kegiatan :<br>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar  | 100%       | Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar<br>-----x100%<br>Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN)      |
|  | Sub Kegiatan:<br>Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                            | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                              | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 laporan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n |
|  | Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  | Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan  | 100%       | Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA<br>-----x100%<br>Jumlah PHBN/PHBA yang direncanakan                            |
|  |  |  | Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti   | 100%       | Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti<br>-----x100%<br>Jumlah rekomendasi Forkopimcam         |
|  | Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  | Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/PHBA  | 1 laporan  | Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA tahun n  |

|  |   |   |   |             |  |
|--|---|---|---|-------------|--|
|  |   |   | Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam   | 4 dokumen   | Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam tahun n  |
|  | Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa  | Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa   | 100 orang   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa tahun n  |
|  | Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                    | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 4 laporan   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tahun n  |
|  | Program:<br>Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                      | Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait   | 100%        | Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait<br>-----x100%<br>Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada                      |
|  | Kegiatan:<br>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan  | 12 kegiatan | Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan tahun n   |
|  | Sub Kegiatan:<br>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik | Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. | 12 laporan  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun n |

|  |   |   |   |            |   |
|--|---|---|---|------------|---|
|  |   | Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia                 |   |            |   |
|  | Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa                           | 100%       | Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDes<br>-----x100%<br>Jumlah Desa  |
|  |   |   | Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti | 100%       | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti<br>-----x100%<br>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa |
|  | Kegiatan :<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa                          | 30 dokumen | Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n  |
|  | Sub Kegiatan:<br>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa               | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                  | Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa          | 30 laporan | Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa tahun n  |
|  | Program:<br>Pemberdayaan Masyarakat   | Meningkatnya Pemberdayaan   | 1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan   | 100%       | Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan APB Desa yang dievaluasi<br>-----x100%  |

|  |   |  |  |            |  |
|--|---|--|--|------------|--|
|  | Desa dan Kelurahan  | Masyarakat Desa dan Kelurahan  | APB Desa yang dievaluasi   |            | Jumlah Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa  |
|  |   |  | 2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif              | 30 lembaga | Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun n                 |
|  | Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa                             | Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina                          | 30 lembaga | Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n                          |
|  | Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Meningkatnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4 laporan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n |

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Tembelang sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

| KATEGORI | NILAI ANGKA  | INTERPRETASI       |
|----------|--------------|--------------------|
| AA       | > 90 s/d 100 | : Sangat Memuaskan |
| A        | > 80 s/d 90  | : Memuaskan        |
| BB       | > 70 s/d 80  | : Sangat Baik      |
| B        | > 60 s/d 70  | : Baik             |
| cc       | > 50 s/d 60  | : cukup Baik       |
| c        | > 40 s/d 50  | : Agak Kurang      |
| D        | 0 s/d 40     | : Kurang           |

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Tembelang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 serta Renja Perubahan 2023.

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Tembelang diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2023, Kecamatan Tembelang memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Tembelang tahun 2023 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembandingan, meliputi:

#### 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tembelang Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Tujuan : 1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Tabel 3.1  
Pencapaian Kinerja

| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET     | REALISASI  | PERSENTASE CAPAIAN |
|--|--|------------|------------|--------------------|
| Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan                         | Nilai Evaluasi AKIP  | BB (72,01) | BB (72,99) | 101,36%            |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan | IKM Kecamatan Tembelang  | 88,85      | 95,36      | 107,33 %           |
|  | IPP Kecamatan Tembelang  | 3,50       | 3,61       | 103,14%            |
|  | Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait | 100%       | 100%       | 100%               |
|  | Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu   | 100%       | 100%       | 100%               |
|  | Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu   | 100%       | 100%       | 100%               |
| <b>RATA - RATA CAPAIAN IKU</b>   |  |            |            | <b>101,97%</b>     |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diketahui bahwa capaian indikator IKU Kecamatan Tembelang Tahun 2023 telah berhasil dan melebihi target sebesar 101,97% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 72,01 telah tercapai 72,99 dengan tingkat capaian 101,36% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/578/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023.
2. IKM Kecamatan Tembelang ditargetkan 88,85 telah tercapai 95,36 dengan tingkat capaian 107,33%. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2023 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

3. IPP Kecamatan Tembelang ditargetkan 3,50 telah tercapai 3,61 dengan tingkat capaian 103,14%.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target 100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap desa di Kecamatan Tembelang telah melaporkan realisasi APB Desa tepat waktu berupa LRA Smt 1 berserta Perdesnya dan LRA akhir Tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 26 dokumen
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Tembelang telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 30 dokumen.

Pencapaian kinerja tersebut dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Pencapaian Kinerja Sasaran  
Kecamatan Tembelang Tahun 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS         | CAPAIAN |
|----|---------------------------|---------|
| 1. | Melebihi/melampaui target | 101,97% |
| 2. | Sesuai target             | -       |
| 3. | Tidak mencapai target     | -       |

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tembelang Tahun 2023 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2023

| NO | PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN   | SASARAN   | INDIKATOR  | TARGET    | REALISASI | PERSENTASE CAPAIAN |
|----|--|---|--|-----------|-----------|--------------------|
|    | Program:<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/                              | Meningkatnya capaian kinerja aparatur   | Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur  | 100%      | 100%      | 100%               |
|    | Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan   | 100%      | 100%      | 100%               |
|    | Sub Kegiatan :<br>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 dokumen | 3 dokumen | 100%               |
|    | 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 dokumen | 5 dokumen | 100%               |
|    | Kegiatan:<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu   | 100%      | 100%      | 100%               |

|  |  |   |  |            |            |      |
|--|--|---|--|------------|------------|------|
|  |  |   | 2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan   | 100%       | 100%       | 100% |
|  | Sub Kegiatan :<br>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 16 orang   | 16 orang   | 100% |
|  | 2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                    | Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% |
|  | 3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD                         | Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 dokumen  | 1 dokumen  | 100% |
|  | Kegiatan:<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah                          | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%       | 100%       | 100% |
|  | Sub Kegiatan :<br>1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. | Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 7 paket    | 7 paket    | 100% |
|  | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor                             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 56 paket   | 56 paket   | 100% |
|  | 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Tersedianya bahan logistik kantor   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 1 paket    | 1 paket    | 100% |

|  |   |  |  |           |           |      |
|--|---|--|--|-----------|-----------|------|
|  | 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2 paket   | 2 paket   | 100% |
|  | 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                 | Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
|  | 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 4 laporan | 4 laporan | 100% |
|  | Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah  | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur                         | 100%      | 100%      | 100% |
|  | 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya       | Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 7 unit    | 7 unit    | 100% |
|  | Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Tembelang                 | 100%      | 100%      | 100% |
|  | Sub Kegiatan :<br>1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                               | 0 stel    | 0 stel    | 100% |

|  |  |   |  |            |            |      |
|--|--|---|--|------------|------------|------|
|  | Kegiatan:<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah   | 100%       | 100%       | 100% |
|  | Sub Kegiatan:<br>1. .Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik  | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 24 laporan | 24 laporan | 100% |
|  | 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Tersedianya jasa umum pelayanan kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 25 laporan | 25 laporan | 100% |
|  | Kegiatan:<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah                     | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik  | 100%       | 100%       | 100% |
|  | Sub Kegiatan:<br>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 unit     | 9 unit     | 100% |
|  | 2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 gedung   | 1 gedung   | 100% |

|  |   |  |   |         |         |         |
|--|---|--|---|---------|---------|---------|
|  | 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi      | 18 unit | 18 unit | 100%    |
|  | Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  | Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik   | Nilai Paten Kecamatan   | 81      | 97,14   | 119,92% |
|  | Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar  | 100%    | 100%    | 100%    |
|  | Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                            | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 100%    | 100%    | 100%    |

|  |  |   |   |           |           |      |
|--|--|---|---|-----------|-----------|------|
|  | Program:<br>Penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintahan<br>Umum                                       | Meningkatnya<br>Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum                                       | Persentase PHBN/PHBA yang<br>dilaksanakan                                       | 100%      | 100%      | 100% |
|  |  |   | Persentase rekomendasi<br>Forkopimcam yang<br>ditindaklanjuti                   | 100%      | 100%      | 100% |
|  | Kegiatan:<br>Penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintahan<br>Umum sesuai<br>Penugasan Kepala<br>Daerah | Terlaksananya<br>Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum<br>sesuai Penugasan Kepala<br>Daerah | Jumlah laporan pelaksanaan<br>PHBN/PHBA   | 1 laporan | 1 laporan | 100% |
|  |  |   | Jumlah Rekomendasi Hasil<br>Koordinasi Forkopimcam                              | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% |
|  | Sub Kegiatan<br>Pembinaan Persatuan<br>dan Kesatuan Bangsa                                       | Terlaksananya Pembinaan<br>Persatuan dan Kesatuan<br>Bangsa                                       | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Pembinaan<br>Persatuan dan<br>Kesatuan Bangsa | 100 orang | 100 orang | 100% |
|  | Sub kegiatan<br>Pelaksanaan Tugas<br>Forum Koordinasi<br>Pimpinan di Kecamatan                   | Terlaksananya Tugas<br>Forum Koordinasi<br>Pimpinan di Kecamatan                                  | Jumlah Dokumen<br>Tugas Forum<br>Koordinasi<br>Pimpinan di Kecamatan            | 4 laporan | 4 laporan | 100% |

|  |   |  |   |             |             |      |
|--|---|--|---|-------------|-------------|------|
|  | Program:<br>Koordinasi<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum   | Meningkatnya Koordinasi<br>Ketentramandan<br>Ketertiban Umum   | Persentase Laporan kasus<br>pelanggaran Perda/Perkada<br>dan Trantibum yang<br>dikoordinasikan ke Instansi<br>Terkait   | 100%        | 100%        | 100% |
|  | Kegiatan:<br>Koordinasi Penerapan<br>dan Penegakan<br>Peraturan Daerah dan<br>Peraturan Kepala<br>Daerah  | Terlaksananya Koordinasi<br>Penerapan dan<br>Penegakan Peraturan<br>Daerah dan Peraturan<br>Kepala Daerah  | Jumlah kegiatan<br>identifikasi kasus<br>pelanggaran Perda/Perkada<br>dan Trantibum yang<br>dilaksanakan  | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 100% |
|  | Sub Kegiatan:<br>Koordinasi/Sinergi<br>Dengan Perangkat<br>Daerah yang Tugas dan<br>Fungsinya di Bidang<br>Penegakan Peraturan<br>Perundang-Undangan<br>dan/atau Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia | Terlaksananya<br>Koordinasi/ Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang Tugas dan<br>Fungsinya di Bidang<br>Penegakan Peraturan<br>Perundang- Undangan<br>dan/ atau Kepolisian<br>Republik Indonesia | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi dengan<br>Perangkat Daerah yang<br>Tugas dan Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan dan/atau<br>Kepolisian Negara Republik<br>Indonesia. | 12 laporan  | 12 laporan  | 100% |
|  | Program: Pembinaan<br>dan Pengawasan<br>Pemerintahan Desa   | Meningkatnya Pembinaan<br>dan Pengawasan<br>Pemerintahan Desa  | Persentase Desa yang<br>melaporkan<br>Pertanggungjawaban<br>Realisasi APB Desa  | 100%        | 100%        | 100% |
|  |   |  | Persentase Rekomendasi<br>Hasil Pembinaan dan<br>Pengawasan Pelaksanaan<br>APB Desa yang<br>ditindaklanjuti   | 100%        | 100%        | 100% |

|  |   |   |  |            |            |      |
|--|---|---|--|------------|------------|------|
|  | Kegiatan :<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa                       | 30 dokumen | 30 dokumen | 100% |
|  | Sub Kegiatan:<br>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa               | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                  | Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa       | 30 dokumen | 30 dokumen | 100% |
|  | Program:<br>Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan   | 1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi                           | 100%       | 100%       | 100% |
|  |   |   | 2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif              | 30 lembaga | 30 lembaga | 100% |
|  | Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa                                  | Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina                          | 30 lembaga | 30 lembaga | 100% |
|  | Sub Kegiatan:<br>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 4 laporan  | 4 laporan  | 100% |

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Target Tahunan | Realisasi     |               |               |
|--|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   |                | 2021          | 2022          | 2023          |
| Sasaran :<br>Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan            | Nilai Evaluasi AKIP   | 72,01          | BB<br>(70,10) | BB<br>(71,72) | BB<br>(72,99) |
| Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota            | Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur   | 100%           | 100%          | 100%          | 100%          |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan | IKM Kecamatan Tembelang   | 88,85          | 88,86         | 91,29         | 95,36         |
| Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik              | Nilai Paten Kecamatan   | 81             | 78,43         | 75,45         | 97,14         |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan | IPP Kecamatan Tembelang   | 3,50           | 2,883         | 2,47          | 3,61          |
| Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                       | Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan  | 100%           | 100%          | 100%          | 100%          |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan | Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait | 100%           | 100%          | 100%          | 100%          |
| Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                     | Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait                         | 100%           | 100%          | 100%          | 100%          |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan | Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu  | 100%           | 100%          | 100%          | 100%          |
| Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                     | Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa   | 100%           | 100%          | 100%          | 100%          |
|  | Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti                                   | 100%           | 100%          | 100%          | 100%          |

|  |  |      |      |      |      |
|--|--|------|------|------|------|
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan | Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu         | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                     | Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi              | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | 100% | 100% | 100% | 100% |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2021-2023 sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP dari tahun 2020-2023 mengalami peningkatan kinerja. Pada tahun 2021-2022 meningkat 1,62 sedangkan tahun 2022-2023 meningkat 1,27. Sedangkan Capaian Kinerja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota realisasi kinerja dari tahun 2021-2022 100% dan tahun 2022-2023 juga realisasi kinerjanya 100%.
2. IKM Kecamatan Tembelang dari tahun 2021-2022 mengalami kenaikan 2,43 dan telah dilakukan strategi perbaikan untuk mendorong peningkatan capaian nilai IKM. Sedangkan tahun 2022-2023 meningkat kembali 4,07. Sedangkan Capaian Kinerja untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik realisasi kinerja dari tahun 2021-2022 100% dan tahun 2022-2023 juga realisasi kinerjanya 100%.
3. IPP Kecamatan Tembelang dari tahun 2021-2022 mengalami penurunan lagi 0,413, sedangkan tahun 2022-2023 mengalami peningkatan 1,14. Sedangkan Capaian Kinerja untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum realisasi kinerja dari tahun 2021-2022 100% dan tahun 2022-2023 juga realisasi kinerjanya 100%.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%. Sedangkan Capaian Kinerja untuk Koordinasi Ketentraman dan

Ketertiban Umum realisasi kinerja dari tahun 2021-2022 100% dan tahun 2022-2023 juga realisasi kinerjanya 100%.

5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%. Sedangkan Capaian Kinerja untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa realisasi kinerja dari tahun 2021-2022 100% dan tahun 2022-2023 juga realisasi kinerjanya 100%.
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%. Sedangkan Capaian Kinerja untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan realisasi kinerja dari tahun 2021-2022 100% dan tahun 2022-2023 juga realisasi kinerjanya 100%.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5  
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                             | Target Akhir Renstra | Realisasi | Tingkat Kemajuan |
|--|---|----------------------|-----------|------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4         | 5                |
| Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan                         | Nilai Evaluasi AKIP                           | 72,01                | 72,99     | 101,36%          |
| Program :<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota         | Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur | 100%                 | 100%      | 100%             |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan | IKM Kecamatan Tembelang                       | 88,85                | 95,36     | 107,33 %         |
| Program :<br>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik           | Nilai Paten Kecamatan                         | 81                   | 97,14     | 119,92%          |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan | IPP Kecamatan Tembelang                       | 3,50                 | 3,61      | 103,14%          |

|   |   |      |      |         |
|---|---|------|------|---------|
| Program :<br>Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum                          | Persentase PHBN/PHBA<br>yang dilaksanakan   | 100% | 100% | 100%    |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan dan<br>layanan Kecamatan    | Persentase laporan kasus<br>pelanggaran<br>Perda/Perkada dan<br>Trantibum yang<br>ditindaklanjuti oleh<br>perangkat daerah atau<br>instansi terkait | 100% | 100% | 100%    |
| Program :<br>Koordinasi<br>Ketentraman dan<br>Ketertiban Umum                           | Persentase Laporan kasus<br>pelanggaran<br>Perda/Perkada dan<br>Trantibum yang<br>dikoordinasikan ke<br>Instansi Terkait                            | 100% | 100% | 100%    |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan dan<br>layanan<br>Kecamatan | Persentase<br>pertanggungjawaban<br>realisasi APB Desa tepat<br>waktu   | 100% | 100% | 100%    |
| Program :<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa                        | Persentase Desa yang<br>melaporkan<br>Pertanggungjawaban<br>Realisasi APB Desa  | 100% | 100% | 100%    |
|   | Persentase Rekomendasi<br>Hasil Pembinaan dan<br>Pengawasan Pelaksanaan<br>APB Desa yang<br>ditindaklanjuti   | 100% | 100% | 100%    |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan dan<br>layanan<br>Kecamatan | Persentase evaluasi<br>Raperdes APB<br>Desa/Perubahan APB<br>Desa tepat waktu   | 100% | 100% | 100%    |
| Program :<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Desa<br>dan Kelurahan                           | Persentase Raperdes APB<br>Desa/Perubahan APB<br>Desa yang dievaluasi   | 100% | 100% | 100%    |
|   | Jumlah Lembaga/Badan<br>Usaha Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Desa/Kelurahan Yang<br>Aktif  | 100% | 100% | 100%    |
| RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN  |   |      |      | 102,26% |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 101,36%, target periode akhir renstra 72,01 pada tahun 2023 telah tercapai 72,99. Sedangkan Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur telah berhasil mencapai target

capaian renstra dengan tingkat kemajuan 100%, target periode akhir renstra 100% pada tahun 2023 telah tercapai 100%.

2. IKM Kecamatan Tembelang telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 107,33%, target akhir periode renstra adalah 88,85 pada tahun 2023 telah tercapai 95,36. Sedangkan Nilai Paten Kecamatan telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 119,92%, target akhir periode renstra adalah 81 pada tahun 2023 telah tercapai 97,14.
3. IPP Kecamatan Tembelang telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 103,14%, target akhir periode renstra 3,50 pada tahun 2023 telah tercapai 3,61. Sedangkan Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 100%, target periode akhir renstra 100% pada tahun 2023 telah tercapai 100%.
4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%, sedangkan Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 100%, target periode akhir renstra 100% pada tahun 2023 telah tercapai 100%.
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%, sedangkan Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa dan Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 100%, target periode akhir renstra 100% pada tahun 2023 telah tercapai 100%.
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%, sedangkan Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi dan Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif telah

berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 100%, target periode akhir renstra 100% pada tahun 2023 telah tercapai 100%.

### 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Realisasi kinerja di level nasional dan kabupaten

Tabel 3.6  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Realisasi Tahun n | Realisasi Nasional | Keterangan  |
|--|---|-------------------|--------------------|---|
| 1  | 2   | 3                 | 4                  | 5   |
| Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan                         | Nilai Evaluasi AKIP   | 72,99             | 83,86              | Indikator nasional adalah nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional              |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan | IKM Kecamatan Tembelang   | 95,36             | 86,25              | Survei Kepuasan Masyarakat Tw II Tahun 2023 Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB |
|  | IPP Kecamatan Tembelang   | 3,61              | 4,36               | Indikator nasional adalah Indeks Pelayanan Publik Nasional                            |
|  | Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait | 100%              | -                  | Tidak ditemukan hasil nasional  |
|  | Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu  | 100%              | -                  | Tidak ditemukan hasil nasional  |
|  | Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat  | 100%              | -                  | Tidak ditemukan hasil nasional  |

Sumber: Laporan Kinerja Kemenpan RB tahun 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap realisasi kinerja di level nasional sebagai berikut:

1. Realisasi Nilai Evaluasi AKIP telah tercapai 72,99 dibawah realisasi nasional yaitu nilai akuntabilitas kinerja nasional 83,86 dengan selisih -10,87.
2. IKM Kecamatan Tembelang telah melebihi realisasi nasional yaitu IKM nasional 86,25 (Survei Kepuasan Masyarakat Tribulan II Tahun 2023 Deputi Bidang Pelayanan Publik) sedangkan realisasi Kecamatan Tembelang 95,36 dengan selisih capaian 9,11.
3. IPP Kecamatan Tembelang tercapai 3,61 masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Nasional yaitu 4,36 dengan selisih -0,75. Untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan
  - o Aspek pelayanan: SP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
  - o Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
  - o Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya serta ada petugas khusus yang membantu
4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait tidak ditemukan hasil nasional
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu tidak ditemukan hasil nasional
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu tidak ditemukan hasil nasional.

Tabel 3.7  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Realisasi Tahun n | Realisasi kabupaten | Keterangan   |
|--|---|-------------------|---------------------|--|
| 1  | 2   | 3                 | 4                   | 5  |
| Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan                         | Nilai Evaluasi AKIP   | 72,99             | 72,70               | Indikator kabupaten adalah nilai akuntabilitas kinerja rata-rata kabupaten |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan | IKM Kecamatan Tembelang   | 95,36             | 88,38               | Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 kabupaten                            |
|  | IPP Kecamatan Tembelang   | 3,61              | 3,39                | Indikator Kabupaten adalah Indeks Pelayanan Publik kabupaten               |
|  | Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait | 100%              | -                   | Tidak ditemukan hasil kabupaten  |
|  | Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu  | 100%              | -                   | Tidak ditemukan hasil kabupaten  |
|  | Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu  | 100%              | -                   | Tidak ditemukan hasil kabupaten  |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap realisasi kinerja di level kabupaten sebagai berikut:

1. Realisasi Nilai Evaluasi AKIP telah tercapai 72,99 di atas realisasi kabupaten yaitu nilai akuntabilitas kinerja kabupaten 72,70 dengan selisih 0,29.
2. IKM Kecamatan Tembelang telah melebihi realisasi kabupaten yaitu IKM kabupaten 88,38 (Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 kabupaten) sedangkan realisasi Kecamatan Tembelang 95,36 dengan selisih capaian 6,98.

3. IPP Kecamatan Tembelang tercapai 3,61 masih di atas realisasi Indeks Pelayanan Publik kabupaten yaitu 3,39 dengan selisih 0,22. Untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan
  - o Aspek pelayanan: SP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
  - o Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
  - o Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya serta ada petugas khusus yang membantu
4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait tidak ditemukan hasil kabupaten.
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu tidak ditemukan hasil kabupaten.
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu tidak ditemukan hasil kabupaten.

## 2. Analisis atas Realisasi Kinerja

Pada tahun 2023 target sasaran strategis Kecamatan Tembelang dapat tercapai dengan rata - rata capaian kinerja 101,97% dengan kata lain kinerja kecamatan dapat mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan pada semua indikator sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja

### 4.1 Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

- a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka

asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

- b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
- c. Dukungan dan komitmen Camat Tembelang, Kepala UPTD/B Se- Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Tembelang untuk mencapai tujuan organisasi.

#### 4.2 Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

- a. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi beberapa kebijakan/peraturan yang ada di masing-masing stakeholder.
- b. Masih adanya tumpang tindih peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. baik itu peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Kecamatan sebagai OPD ataupun Kecamatan sebagai pembina pemerintahan desa.
- c. Kurangnya jumlah aparatur yang ada di Kecamatan Tembelang, terutama para petugas pelayanan
- d. Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai baik yang bertugas di pelayanan ataupun yang bertugas di administrasi yang masih kurang memadai.
- e. Implementasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat utamanya pada point pelayanan rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kurang relevan disebabkan terbatasnya kemampuan SDM aparatur Kecamatan, sedangkan pada pelayanan bidang non perijinan point Mencetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk juga kurang relevan disebabkan walaupun Kecamatan sudah diberi kewenangan untuk mencetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, namun pencetakan tersebut hanya sebatas pada KTP dan KK yang tidak bermasalah, apabila ada permasalahan terkait data ganda ataupun data tidak ditemukan, maka penduduk tetap

harus datang sendiri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selain itu Kecamatan juga belum diberi kewenangan untuk pencetakan Ata Kelahiran dan Akta Kematian, karena kewenangan tersebut masih ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kewenangan mencetak/menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah pada Dispendukcapil Kab. Jombang, kecamatan hanya berhak memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

- f. Kurangnya pemahaman aparatur Kecamatan Tembelang dan beberapa OPD atau stakeholder terkait terhadap penerapan SAKIP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- g. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendukung pelayanan yang perlu dipenuhi seperti arena bermain anak, toilet PATEN, dan Tempat Ibadah, selain itu Kecamatan Tembelang juga membutuhkan running text dan Neon Box serta CCTV dalam mendukung pelayanan agar masyarakat merasa nyaman.

#### 4.3 Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

- a. Melaksanakan inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perUndangan terkait Pemerintahan Daerah utamanya Kecamatan.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kepada seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.
- c. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
- d. Mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait dengan penerbitan regulasi adanya revisi beberapa point pada regulasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- e. Melakukan evaluasi internal setiap akhir tribulan terkait tanggung jawab penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi agar semua stakeholder memahami bahwasanya SAKIP adalah tanggung bersama.

3. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Kecamatan Tembelang menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan

| Program/Kegiatan/Subkegiatan  | Indikator Kinerja Proram (outcome) dan kegiatan (output)   | Realisasi Kinerja | % Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran | % Capaian Anggaran | Menunjang/kurang |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Program:<br>Penunjang<br>Pemerintahan<br>Kabupaten/ kota<br>Urusan<br>Daerah                      | Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur  | 100%              | 100%              | 2.287.468.074      | 83,01%             | Menunjang        |
| Kegiatan:<br>Perencanaan, Penganggaran<br>dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat                       | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan   | 100%              | 100%              | 5.219.900,00       | 99,09%             | Sangat menunjang |
| Sub Kegiatan :<br>1. Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3<br>dokumen      | 3<br>dokumen      | 3.760.900          | 98,75%             | Sangat menunjang |
| 2. Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5<br>dokumen      | 5<br>dokumen      | 1.459.000          | 100%               | Sangat menunjang |
| Kegiatan:<br>Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah  | 1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu<br>2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan   | 100%              | 100%              | 1.824.379.814      | 80,56%             | Menunjang        |
| Sub Kegiatan :<br>1. Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 16 orang          | 16 orang          | 1.754.845.814      | 79,94%             | Menunjang        |
| 2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12<br>dokumen     | 12<br>dokumen     | 68.850.000         | 100%               | Sangat menunjang |
| 3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD                                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1<br>laporan      | 1<br>laporan      | 684.000            | 100%               | Sangat menunjang |
| Kegiatan:<br>Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah  | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran  | 100%              | 100%              | 98.786.550         | 89,39%             | Sangat menunjang |
| Sub Kegiatan :<br>1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 7 paket           | 7 paket           | 3.291.300          | 100%               | Sangat menunjang |

|  |  |            |            |               |        |                  |
|--|--|------------|------------|---------------|--------|------------------|
| Sub Kegiatan :<br>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 56 paket   | 56 paket   | 20.433.050    | 100%   | Sangat menunjang |
| Sub Kegiatan :<br>3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 1 paket    | 1 paket    | 37.370.000    | 77,21% | Menunjang        |
| Sub Kegiatan :<br>4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2 paket    | 2 paket    | 3.024.200     | 99,99% | Sangat menunjang |
| Sub Kegiatan :<br>5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                           | 1 dokumen  | 1 dokumen  | 2.220.000     | 100%   | Sangat menunjang |
| Sub Kegiatan :<br>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 4 laporan  | 4 laporan  | 32.448.000,00 | 97,86% | Sangat menunjang |
| Kegiatan:<br>Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah  | Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur   | 100%       | 100%       | 54.146.000    | 84,05% | Menunjang        |
| Sub Kegiatan :<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 7 unit     | 7 unit     | 54.146.000    | 84,05% | Menunjang        |
| Kegiatan:<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah   | 100%       | 100%       | 161.165.290   | 98,42% | Sangat menunjang |
| Sub Kegiatan:<br>1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 24 laporan | 24 laporan | 42.883.070    | 99,38% | Sangat menunjang |
| Sub Kegiatan :<br>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 25 laporan | 25 laporan | 118.282.220   | 99,08% | Sangat menunjang |
| Kegiatan:<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik  | 100%       | 100%       | 143.770.520   | 97,87% | Sangat menunjang |
| Sub Kegiatan:<br>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 unit     | 9 unit     | 31.424.283    | 92,46% | Sangat menunjang |
| Sub Kegiatan :<br>2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 gedung   | 1 gedung   | 104.600.237   | 99,46% | Sangat menunjang |
| Sub Kegiatan :<br>3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 18 unit    | 18 unit    | 7.746.000     | 100%   | Sangat menunjang |
| Program:<br>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  | Nilai Paten Kecamatan  | 81         | 97,14      | 2.100.000     | 100%   | Sangat menunjang |
| Kegiatan :<br>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan     | Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar   | 100%       | 100%       | 2.100.000     | 100%   | Sangat menunjang |
| Sub Kegiatan:<br>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan    | 12 laporan | 12 laporan | 2.100.000     | 100%   | Sangat menunjang |
| Program:<br>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum   | Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan   | 100%       | 100%       | 22.642.000    | 99,94% | Sangat menunjang |
|  | Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti  | 100%       | 100%       |               |        |                  |
| Kegiatan:<br>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah   | Jumlah laporan pelaksanaan PHBN/PHBA   | 1 laporan  | 1 laporan  | 22.642.000    | 99,94% | Sangat menunjang |
|  | Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam  | 4 dokumen  | 4 dokumen  |               |        |                  |

|  |  |             |             |               |        |                  |
|--|--|-------------|-------------|---------------|--------|------------------|
| Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa  | 100 orang   | 100 orang   | 18.854.500    | 100%   | Sangat menunjang |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 4 dokumen   | 4 dokumen   | 3.787.500     | 99.67% | Sangat menunjang |
| Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait  | 100%        | 100%        | 28.850.000    | 100%   | Sangat menunjang |
| Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan   | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 28.850.000    | 100%   | Sangat menunjang |
| Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. | 12 laporan  | 12 laporan  | 28.850.000    | 100%   | Sangat menunjang |
| Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  | Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa  | 100%        | 100%        | 3.500.000     | 100%   | Sangat menunjang |
|  | Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti  | 100%        | 100%        |               |        |                  |
| Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa   | 30 dokumen  | 30 dokumen  | 3.500.000     | 100%   | Sangat menunjang |
| Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | 30 dokumen  | 30 dokumen  | 3.500.000     | 100%   | Sangat menunjang |
| Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  | 1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi   | 100%        | 100%        | 40.594.000,00 | 100%   | Sangat menunjang |
|  | 2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif  | 30 lembaga  | 30 lembaga  |               |        |                  |
| Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina  | 30 lembaga  | 30 lembaga  | 40.594.000,00 | 100%   | Sangat menunjang |
| Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 4 laporan   | 4 laporan   | 40.594.000,00 | 100%   | Sangat menunjang |

### 3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Tembelang Tahun 2023, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program , 12 kegiatan, dan 23 sub kegiatan.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya

kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2023 ini Kecamatan Tembelang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.853.252.535,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.385.154.074,00 atau serapan dana APBD mencapai 83,59% sehingga dapat diketahui pada tahun 2023 kondisi anggaran silpa Rp. 468.098.461,00 ( karena di tahun 2023 ada 5 ASN yang pensiun dan 1 orang meninggal dunia terutama kelebihan di gaji dan tunjangan ASN ).

Selanjutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.9  
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

| No            | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Anggaran (Rp)           | % Anggaran    |
|---------------|--|--|-------------------------|---------------|
| 1             | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan                         | Nilai Evaluasi AKIP  | 2.755.553.535,00        | 96,58         |
| 2             | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan | IKM Kecamatan Tembelang  | 24.755.000              | 0,87          |
|               |  | IPP Kecamatan Tembelang  |                         |               |
|               |  | Persentase laporan kasu pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait | 28.850.000,00           | 1,01          |
|               |  | Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu   | 3.500.000,00            | 0,12          |
|               |  | Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu   | 40.594.000,00           | 1,42          |
| <b>JUMLAH</b> |  |  | <b>2.853.252.535,00</b> | <b>84,45%</b> |

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran sasaran adalah sebagai berikut:

### 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

| No.                                     | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Kinerja |           |           | Anggaran      |                |           |
|---|--|---|---------|-----------|-----------|---------------|----------------|-----------|
|   |  |   | Target  | Realisasi | Capaian % | Alokasi (Rp)  | Realisasi (Rp) | Capaian % |
| 1                                       | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan                         | Nilai Evaluasi AKIP   | 72,01   | 72,99     | 101,36    | 2.755.553.535 | 2.287.468.074  | 83,01     |
| 2                                       | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan | IKM Kecamatan Tembelang   | 88,85   | 95,36     | 107,33    | 2.100.000,00  | 2.100.000      | 100       |
|   |  | IPP Kecamatan Tembelang   | 3,50    | 3,61      | 103,14    | 22.655.000,00 | 22.642.000     | 99,94     |
|   |  | Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait | 100%    | 100%      | 100       | 28.850.000    | 28.850.000     | 100       |
|   |  | Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu  | 100%    | 100%      | 100       | 3.500.000     | 3.500.000      | 100       |
|   |  | Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu  | 100%    | 100%      | 100       | 40.594.000    | 40.594.000     | 100       |
| RATA -RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN |  |   |         |           | 101,97    | 2.853.252.535 | 2.385.154.074  | 83,59     |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan perangkat daerah "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang berkualitas" dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 83,59% telah menghasilkan kinerja sebesar 101,97% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 18,38%. Secara rinci pencapaian kinerja program dan anggaran Kecamatan Tembelang tersaji dalam tabel berikut ini:

**TABEL 3.11**  
**PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN TEMBELANG TAHUN 2023**

| NAMA PROGRAM  | INDIKATOR KINERJA   | KINERJA    |            |            | ANGGARAN      |               |         |
|---|---|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------|
|   |   | TARGET     | REALISASI  | CAPAIAN    | ALOKASI       | REALISASI     | CAPAIAN |
| Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Nilai Paten Kecamatan   | 81         | 97,14      | 119,92     | 2.100.000     | 2.100.000     | 100%    |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa                                     | 100        | 100        | 100        | 3.500.000     | 3.500.000     | 100%    |
|   | Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti           | 100        | 100        | 100        |               |               |         |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum          | Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait | 100        | 100        | 100        | 28.850.000    | 28.850.000    | 100%    |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          | 1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi  | 100        | 100        | 100        | 40.594.000    | 40.594.000    | 100%    |
|   | 2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif                           | 30 lembaga | 30 lembaga | 30 lembaga |               |               |         |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan  | 100        | 100        | 100        | 22.655.000    | 22.642.000    | 99,94%  |
|   | Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti   | 100        | 100        | 100        |               |               |         |
| Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur   | 100        | 100        | 100        | 2.755.553.535 | 2.287.468.074 | 83,01%  |
| RATA -RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN         |   |            |            | 100        | 2.853.252.535 | 2.385.154.074 | 83,59%  |

### 3.2.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Tembelang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2018-2023 Kecamatan Tembelang yakni: Terwujudnya Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat, sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Tembelang melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Tembelang langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

a. Transparan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Responsif

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

c. Efisien

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

d. Efektif

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan

pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

f. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Tembelang melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12  
Efisiensi Penggunaan Anggaran

| NO  | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | % CAPAIAN KINERJA | % PENYERAPAN ANGGARAN | TINGKAT EFISIENSI |
|---|--|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.  | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan                         | Nilai Evaluasi AKIP  | 101,36            | 83,59                 | 17,77             |
| 2.  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan | IKM Kecamatan Tembelang  | 107,33            | 100                   | 7,33              |
|   |  | IPP Kecamatan Tembelang  | 103,14            | 99,94                 | 3,2               |
|   |  | Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait | 100               | 100                   | -                 |
|   |  | Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu   | 100               | 100                   | -                 |
|   |  | Persentase evaluasi Raperdes AP Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu                                    | 100               | 100                   | -                 |
| TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN |  |  | 101,97            | 97,25                 | 4,45              |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian rata - kinerja yang melebihi target yaitu sebesar 101,97% dengan menggunakan anggaran sebesar 97,25% jadi telah terjadi efisiensi anggaran sebesar 4,45% (selisih antara capaian kinerja-anggaran). Dengan penerapan prinsip efisien dalam penggunaan anggaran akan tetapi mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.

Tabel 3.13  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | KINERJA TAHUN 2023 |            |                    | SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2023 |                  |                    | EFISIENSI SDM |
|--|---|--------------------|------------|--------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|---------------|
|  |   | TARGET             | REALISASI  | PERSENTASE CAPAIAN | KEBUTUHAN SDM (ABK)            | KETERSEDIAAN SDM | % KETERSEDIAAN SDM |               |
| Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan                         | Nilai Evaluasi AKIP   | BB (72,01)         | BB (72,99) | 101,36%            | 9                              | 4                | 44%                | 57,36         |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan | IKM Kecamatan Tembelang   | 88,85              | 95,36      | 107,33             | 5                              | 2                | 40%                | 67,33         |
|  | IPP Kecamatan Tembelang   | 3,50               | 3,61       | 103,14             |                                |                  |                    | 63,14         |
|  | Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait | 100%               | 100%       | 100%               | 4                              | 1                | 25%                | 75            |
|  | Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu  | 100%               | 100%       | 100%               | 3                              | 1                | 33%                | 67            |
|  | Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu  | 100%               | 100%       | 100%               | 3                              | 1                | 33%                | 67            |
| RATA - RATA CAPAIAN IKU  |   |                    |            | 101,97%            | RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM     |                  | 35%                | 66,97         |

Dari tabel 3.7 dapat disimpulkan bahwa telah terdapat efisiensi sumber daya manusia sebesar 66,97 dimana dari 24 anjab ABK Kecamatan Tembelang ketersediaan SDM adalah 9 dengan persentase ketersediaan 35% dengan keterbatasan SDM mampu mencapai kinerja melebihi target yaitu 101,97%.

Tabel 3.14  
Efisiensi Sarana dan Prasarana

| URAIAN   | HASIL REKON 2023 | USULAN STANDAR KEBUTUHAN | TINGKAT EFISIENSI % |
|--|------------------|--------------------------|---------------------|
| 1  | 2                | 3                        | 4                   |
| Tanah Bangunan Kantor Pemerintah                   | 1                | 1                        | -                   |
| Tanah Lapangan Sepak Bola                          | 1                | 1                        |                     |
| Station Wagon                                      | 1                | 1                        | -                   |
| Sepeda Motor                                       | 35               | 35                       | -                   |
| Scanner (Universal Tester)                         | 1                | 1                        | -                   |
| Lemari Kayu  | 1                | 1                        | -                   |
| Filing Cabinet Besi                                | 1                | 1                        | -                   |
| Mesin Absensi                                      | 1                | 1                        | -                   |
| LCD Projector/Infocus                              | 1                | 1                        | -                   |
| Mesin Antrian                                      | 1                | 1                        | -                   |
| Sice   | 1                | 1                        | -                   |
| Tempat Tidur Kayu                                  | 1                | 1                        | -                   |
| Meja Podium  | 1                | 1                        | -                   |
| Kursi Biasa  | 1                | 1                        | -                   |
| Bangku Tunggu                                      | 3                | 3                        | -                   |
| Mesin Pemotong Rumput                              | 1                | 1                        | -                   |
| A.C. Split   | 7                | 7                        | -                   |
| Kipas Angin  | 2                | 2                        | -                   |
| Treng Air/Tandon Air                               | 1                | 1                        | -                   |
| Televisi   | 3                | 3                        | -                   |
| Sound System                                       | 1                | 1                        | -                   |
| Tustel   | 1                | 1                        | -                   |
| Gordyin/Kray                                       | 1                | 1                        | -                   |
| Meja Kerja Pejabat Eselon III                      | 1                | 1                        | -                   |
| Meja Kerja Pejabat Eselon IV                       | 1                | 1                        | -                   |
| Meja Rapat Pejabat lainnya                         | 7                | 7                        | -                   |
| Kursi Kerja Pejabat Eselon III                     | 1                | 1                        | -                   |
| Kursi Kerja Pejabat lainnya                        | 8                | 8                        | -                   |
| Kursi Tamu di Depan Ajudan                         | 1                | 1                        | -                   |
| Layar Film/Projector                               | 1                | 1                        | -                   |
| Kursi Dorong                                       | 1                | 1                        | -                   |
| Meja Kerja   | 1                | 1                        | -                   |
| P.C Unit   | 8                | 8                        | -                   |
| Lap Top  | 8                | 8                        | -                   |
| Note Book  | 2                | 2                        | -                   |
| Printer (Peralatan Personal                        | 10               | 10                       | -                   |
| Peralatan Komputer lainnya                         | 1                | 1                        | -                   |
| Bangunan Gedung Kantor Permanen                    | 1                | 1                        | -                   |
| Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen | 4                | 4                        | -                   |
| Bangunan Parkir Terbuka                            | 1                | 1                        | -                   |

|                                       |            |            |             |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Pagar Permanen                        | 2          | 2          | -           |
| Maket & Foto Dokumen Lain-lain        | 1          | 1          | -           |
| Portable Water Pump                   | 1          | 1          | -           |
| Lemari Penyimpan                      | 1          | 4          | -           |
| Rak Kayu                              | 2          | 2          | -           |
| Filing Cabinet Besi                   | 1          | 1          | -           |
| Papan Pengumuman                      | 2          | 2          | -           |
| Kursi Biasa                           | 28         | 28         | -           |
| Meja 1/2 Biro                         | 11         | 11         | -           |
| Kursi Rapat                           | 35         | 35         | -           |
| Kursi Lipat                           | 120        | 131        | 8,39        |
| Kipas Angin                           | 1          | 1          | -           |
| Kursi Lipat                           | 1          | 1          | -           |
| Kompore Gas (Alat Dapur)              | 1          | 1          | -           |
| Loudspeaker                           | 1          | 1          | -           |
| Sound System                          | 1          | 1          | -           |
| Lambang Garuda Pancasila              | 1          | 1          | -           |
| Gambar Presiden/Wakil Presiden        | 2          | 2          | -           |
| Alat Pemadam/Portable                 | 3          | 3          | -           |
| Kursi Kerja Pejabat Eselon IV         | 1          | 1          | -           |
| Telephone Hybrid                      | 1          | 1          | -           |
| Laminating Module With 4 Reels        | 1          | 1          | -           |
| alat keamanan lainnya (dst)           | 1          | 1          | -           |
| Personal Komputer lainnya             | 1          | 1          | -           |
| Printer (Peralatan Personal Komputer) | 12         | 12         | -           |
| Peralatan Personal Komputer           | 3          | 3          | -           |
| <b>TOTAL SARPRAS</b>                  | <b>360</b> | <b>376</b> |             |
| <b>RATA –RATA TINGKAT EFISIENSI</b>   |            |            | <b>8,39</b> |

Sumber Hasil Rekonsiliasi Tahun 2023 dan RKBMD tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil rekonsiliasi BMD tahun 2023 terdapat 360 sarana dan prasarana di Kecamatan Tembelang sedangkan hasil analisis standar kebutuhan adalah 376 sarana prasarana jadi untuk tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja adalah 8,39%.

### 3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Upaya -Upaya atau alternatif-alternatif yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi AKIP tahun berikutnya berdasarkan sesuai dengan Hasil evaluasi SAKIP nomor: X.700/578/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023 . adalah

memperbaiki nilai SAKIP terutama pada komponen komponen Pelaporan Kinerja dengan capaian nilai terendah dibanding komponen lain dengan upaya:

- Melengkapi upaya dan hambatan secara spesifik kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata atau hambatan pada masing - masing sasaran strategis/sasaran program
  - Menambahkan informasi efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja
  - Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran dan perencanaan kinerja
2. Dalam rangka peningkatan nilai IKM Kecamatan Tembelang pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait 9 unsur SKM akan dilakukan perbaikan pada unsur:
- Aspek sarana dan Prasarana, telah diusulkan alat peraga PAUD untuk sebagai kelengkapan sarana dan prasarana PATEN
  - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang masuk baik secara online maupun offline
3. Dalam rangka peningkatan nilai IPP Kecamatan Tembelang yang masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Nasional untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan:
- Aspek pelayanan: SP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
  - Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
  - Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya serta ada petugas khusus yang membantu
4. Dalam rangka peningkatan upaya tindaklanjut laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum akan lebih difokuskan

pada peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait baik kepolisian, Satpol PP, BPBD dan lain-lain.

5. Dalam rangka peningkatan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Desa dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes (LRA beserta dengan Perdesnya)
6. Dalam rangka peningkatan Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan fasilitasi dan pembinaan Desa dalam rangka penyusunan Raperdes'
4. IKM Kecamatan Tembelang tidak ditemukan hasil nasional terkait hasil survei kepuasan masyarakat
5. IPP Kecamatan Tembelang tercapai 3,61 masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Nasional yaitu 3,88 dengan selisih -0,27. Untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan
  - o Aspek pelayanan: SP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
  - o Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
  - o Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya serta ada petugas khusus yang membantu
6. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait tidak ditemukan hasil nasional
7. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu tidak ditemukan hasil nasional
8. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu tidak ditemukan hasil nasional

### 3.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2023 Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP sebagai berikut:

**TABEL 3.15**  
**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL**  
**EVALUASI SAKIP**

| NO. | REKOMENDASI  | RENCANA AKSI TINDAK LANJUT   | TARGET    | WAKTU PENYELESAIAN | PENANGGUNG JAWAB | STATUS / PROGRES   |
|-----|--|--|-----------|--------------------|------------------|--------------------|
| 1   | Dalam menetapkan target kinerja terutama pada indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebaiknya memenuhi kriteria realitis dengan mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya   | Perbaikan Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) sudah dikoordinasikan sama pejabat struktural agar target yang diharapkan dapat terealisasi dengan tergetnya | 1 dokumen | 1 hari             | CAMAT            | Telah dilaksanakan |
| 2   | Melakukan sosialisasi kepada semua staf terkait sasaran, indikator, dan terget kinerja yang akan dicapai dan melengkapi dengan bukti dukung yang memadai sehingga diharapkan semua staf memahami sehingga diharapkan semua staf memahami dan peduli atas hasil pengkuran kinerja | Telah dilaksanakan sosialisasi dan penetapan sasaran, indikator, dan target kinerja pada awal tahun  | 1 dokumen | 1 hari             | CAMAT            | Telah dilaksanakan |
| 3   | Melakukan perbaikan SK Reward dan Punishment dengan menambahkan dasar perhitungan yang jelas terhadap indikator penilaian seperti Sinergitas dan Disiplin Kerja  | Memperbaiki dokumen SK dan SOP pemberian reward dan punishment   | 1 dokumen | 2 hari             | CAMAT            | Telah dilaksanakan |

|   |  |  |           |        |       |                    |
|---|--|--|-----------|--------|-------|--------------------|
| 4 | Menambah informasi efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai dalam laporan kinerja                              | Telah ditambahkan informasi efisiensi penggunaan sumber daya manusia                   | 1 dokumen | 1 hari | CAMAT | Telah dilaksanakan |
| 5 | Menambah informasi secara rinci dan selaras terhadap upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja atas hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja | Telah dilaksanakan Penambahan informasi dan hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja | 1 dokumen | 3 hari | CAMAT | Telah dilaksanakan |
| 6 | Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja OPD serta penyesuaian aktivitas dalam rencana aksi          | Telah menginformasikan Laporan Kinerja dalam penyesuaian rencana aksi                  | 1 dokumen | 3 hari | CAMAT | Telah dilaksanakan |

|   |   |  |           |        |       |                    |
|---|---|--|-----------|--------|-------|--------------------|
| 7 | Mengusulkan untuk mengikuti bimbingan teknis terkait evaluasi SAKIP bagi anggota tim evaluasi SAKIP internal sehingga terdapat peningkatan kompetensi evaluator SAKIP Internal  | Telah dilaksanakan bimtek SAKIP yang menghadirkan Bagian Organisasi  | 1 dokumen | 1 hari | CAMAT | Telah dilaksanakan |
| 8 | Memfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target kinerja   | Penetapan target kinerja sudah didasarkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya dalam rangka perbaikan kinerja | 1 dokumen | 1 hari | CAMAT | Telah dilaksanakan |
| 9 | Memperbaiki dokumen LKJIP Kecamatan Tembelang dengan menjelaskan sumber yang valid terhadap tabel-tabel capaian kinerja untuk kedepannya agar melengkapi bukti pendukung Monev Renaksi serta dokumen capaian kinerja lainnya yang sepenuhnya menggambarkan tindak lanjut dalam mencapai kinerja | Terlah dilakukan perbaikan dokumen LKJIP beserta dokumennya dalam mendukung Monev Renaksi                        | 1 dokumen | 1 hari | CAMAT | Telah dilaksanakan |

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Tembelang berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2018-2023

Kecamatan Tembelang. Laporan kinerja Kecamatan Tembelang Tahun 2023 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Tembelang.

Selama Tahun 2022 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni "Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan" dan "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan" dengan capaian kinerja sebesar 101,97% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 72,01 telah tercapai 72,99 dengan tingkat capaian 101,36% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/578/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023.
2. IKM Kecamatan Tembelang ditargetkan 88,85 telah tercapai 95,36 dengan tingkat capaian 107,33%. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2023 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
3. IPP Kecamatan Tembelang ditargetkan 3,50 telah tercapai 3,61 dengan tingkat capaian 103,14%.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target 100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian

100%. Setiap desa di Kecamatan Tembelang telah melaporkan realisasi APB Desa tepat waktu berupa LRA Smt 1 berserta Perdesnya dan LRA akhir Tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 30 dokumen

6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Tembelang telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 30 dokumen.

#### 4.2 Saran Perbaikan

Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Dan sesuai dengan perodesasi Renstra yang berakhir pada Tahun 2023 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2018-2023.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Tembelang untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

1. Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi AKIP tahun berikutnya berdasarkan sesuai dengan Hasil evaluasi SAKIP nomor: X.700/578/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023 adalah memperbaiki nilai SAKIP terutama pada komponen komponen Pelaporan Kinerja dengan capaian nilai terendah dibanding komponen lain dengan upaya:
  - Melengkapi upaya dan hambatan secara spesifik kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata atau hambatan pada masing - masing sasaran strategis/sasaran program
  - Menambahkan informasi efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja
  - Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran dan perencanaan kinerja
2. Dalam rangka peningkatan nilai IKM Kecamatan Tembelang pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait 9 unsur SKM akan dilakukan perbaikan pada unsur:
  - Aspek sarana dan Prasarana, telah diusulkan alat peraga PAUD untuk sebagai kelengkapan sarana dan prasarana PATEN

- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang masuk baik secara online maupun offline
3. Dalam rangka peningkatan nilai IPP Kecamatan Tembelang yang masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Nasional untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan:
    - Aspek pelayanan: SP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
    - Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
    - Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya serta ada petugas khusus yang membantu
  4. Dalam rangka peningkatan upaya tindaklanjut laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum akan lebih difokuskan pada peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait baik kepolisian, Satpol PP, BPBD dll
  5. Dalam rangka peningkatan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Desa dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes (LRA beserta dengan Perdesnya)
  6. Dalam rangka peningkatan Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan fasilitasi dan pembinaan Desa dalam rangka penyusunan Raperdes.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tembelang diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Tembelang kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Tembelang, 07 Mei 2024

CAMAT TEMBELANG

AGUS SANTOSO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 197303291992011001





**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR : 060.1/813/415.01/2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS SANTOSO, S.Sos.**  
Jabatan : **Camat Tembelang**  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

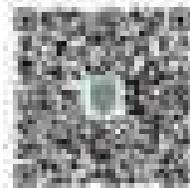
Nama : **SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**  
Jabatan : **Pj. Bupati Jombang**  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 8 November 2023  
PIHAK PERTAMA  
Camat Tembelang

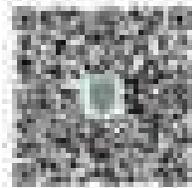
Ditandatangani secara elektronik



**AGUS SANTOSO, S.Sos.**  
NIP. 197303291992011001

PIHAK KEDUA  
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



**SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG**

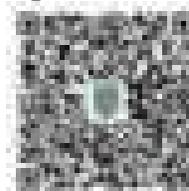
| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET     |
|----|---|--|------------|
| 1. | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja kecamatan                | Nilai Evaluasi AKIP Kec. Tembelang   | BB (72,01) |
| 2. | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan | IKM Kecamatan Tembelang  | 88,85      |
|    |   | IPP Kecamatan Tembelang  | 3,50       |
|    |   | Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait | 100%       |
|    |   | Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu   | 100%       |
|    |   | Persentase Evaluasi RAPERDES APBDesa/ Perubahan APB Desa tepat waktu                                   | 100%       |

| NO | SASARAN PROGRAM  | PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM   | TARGET | ANGGARAN   |
|----|--|---|---|--------|------------|
| 1. | Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik | Nilai Paten Kecamatan   | 81     | 2.100.000  |
| 2. | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa                                     | 100%   | 3.500.000  |
|    |  |   | Persentase Rekomendasi hasil pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti            | 100%   |            |
| 3. | Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait | 100%   | 28.850.000 |
| 4. | Meningkatnya Pemberdayaan                                      | Program Pemberdayaan                                      | Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan  | 100%   | 40.594.000 |

|               |   |   |  |            |                      |
|---------------|---|---|--|------------|----------------------|
|               | Masyarakat Desa dan Kelurahan                         | Masyarakat Desa dan Kelurahan                               | APB Desa yang dievaluasi   |            |                      |
|               |   |   | Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | 30 lembaga |                      |
| 5             | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            | Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan                                       | 100%       | 22.655.000           |
|               |   |   | Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti                      | 100%       |                      |
| 6             | Meningkatnya capaian kinerja aparatur                 | Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur                                | 100%       | 2,755,553,535        |
| <b>JUMLAH</b> |   |   |  |            | <b>2.853.252.535</b> |

Jombang, 8 November 2023  
**PIHAK PERTAMA**  
Camat Tembelang

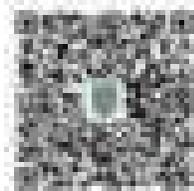
Ditandatangani secara elektronik



**AGUS SANTOSO, S.Sos.**  
NIP. 197303291992011001

**PIHAK KEDUA**  
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



**SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**

**KERTAS KERJA PENETAPAN TARGET  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG**

Nama : AGUS SANTOSO, S.Sos  
 NIP : 19730329 199201 1 001  
 Pangkat/Golongan : Pembina / IV a  
 Jabatan : CAMAT  
 Unit Kerja : KECAMATAN TEMBELANG  
 Tugas Pokok : Mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.  
 Fungsi : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum  
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat  
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati  
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan  
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan  
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan  
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

| No | Indikator Kinerja Utama/ Individu | Keterlibatan dengan Komponen Perencanaan (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan) | Target Tahun N-1 | Realisasi Tahun N-1 | Target Tahun N | Analisis/ Dasar Penetapan  |
|----|-----------------------------------|--|------------------|---------------------|----------------|--|
| 1  | Nilai Evaluasi AKIP               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA                       | 71,01            | 71,72               | 72,01          | Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 tercapai nilai AKIP 71,72 (melebihi target dengan capaian 100,99%). Setelah dilaksanakan rapat internal penetapan target pada tanggal 4 Januari 2023 ditetapkan target nilai Evaluasi AKIP Tahun 2023 adalah 72,01. Untuk mencapai nilai 72,01 akan perbaikan dokumen sakip sesuai dengan BA Hasil evaluasi SAKIP nomor: X.700/356/415.15/2022 tanggal 30 September 2022. Pada evaluasi SAKIP tahun 2022 nilai terendah Kecamatan Tembelang pada komponen PENGUKURAN KINERJA dan EVALUASI INTERNAL akan dilaksanakan perbaikan dokumen sebagai berikut:<br>1. 1. Monitoring jangka menengah menyimpulkan pencapaian kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan ke depannya. |

|   |                         |   |       |       |       |  |
|---|-------------------------|---|-------|-------|-------|--|
|   |                         |   |       |       |       | 2. SOP pengumpulan data kinerja dengan menyajikan alur yang jelas beserta penanggung jawab setiap tahapannya. Evaluasi internal dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.   |
| 2 | IKM Kecamatan Tembelang | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 87,75 | 91,29 | 88,85 | Berdasarkan hasil capaian IKM Kecamatan Tembelang 2022 mencapai target yang ditetapkan dari target nilai 87,75 tercapai 91,29 (104,03%). Untuk target 2023 berdasarkan hasil rapat internal penetapan target tanggal 4 Januari 2023 ditetapkan target nilai IKM Kecamatan Tembelang Tahun 2023 adalah 88,85.<br>Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait 9 unsur SKM akan dilakukan perbaikan pada unsur:<br>1. Kompetensi petugas: • Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoring dan peningkatan kinerja pelayanan. • Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama. • Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang<br>2. Sarana dan prasarana: • Menambah sarana dan prasarana yang ada dipelayanan ( akses bagi disabilitas, toilet ) |
|   |                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          |       |       |       |  |
| 3 | IPP Kecamatan TEMBELANG | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 3,45  | 2,47  | 3,50  | Berdasarkan hasil capaian IPP Kecamatan Tembelang tahun 2022 adalah 2,47 maka tidak bisa mencapai target yang diharapkan. Penetapan target 3,50 didasarkan pada capaian tahun 2023. Untuk mencapai nilai tersebut akan dilakukan perbaikan pada aspek penilaian:<br>1. Aspek Kebijakan Pelayanan: • Informasi SKM agar dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media sosial dan media cetak   |

|   |   |  |      |      |      |  |
|---|---|--|------|------|------|--|
|   |   |  |      |      |      | <p>3. Aspek sarana dan prasarana: • Direncanakan pada PAK 2023 akan dilaksanakan pembangunan jalur Difabel</p> <p>4. Konsultasi dan Pengaduan: • Arsip proses konsultasi terdokumentasi dan mudah diakses di website, dokumen/arsip lainnya</p> <p>5. INOVASI: • Pelayanan Kecamatan Tembelang menampilkan/memamerkan produk unggulan desa dalam rangka mempromosikan produk-produk unggulan desa.</p>   |
|   |   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |      |      |      |  |
| 4 | Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 100% | 100% | 100% | <p>Target Prosentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait ditetapkan 100%. Jumlah laporan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait ditargetkan 12 laporan, dengan formulasi sebagai berikut:</p> <p>Jumlah laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang tindaklanjuti PD/ instansi terkait<br/>-----x 100</p> <p>Jumlah seluruh laporan pelanggaran perda dan trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait</p> |
| 5 | Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 100% | 100% | 100% | <p>Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu target tahun 2023 adalah 100% karena bisa dipastikan semua Desa (15 Desa) dapat melaporkan pertanggungjawaban APBDes (LPPDes) tepat waktu dengan formulasi:</p> <p>Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu<br/>..... x 100 % Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa</p>   |
| 6 | Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ APB Desa tepat waktu   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN            | 100% | 100% | 100% | <p>Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu target tahun 2023 adalah 100% karena bisa dipastikan semua desa (13 desa) menyusun Raperdes (raperdes APBDes dan raperdes Perubahan) tepat waktu dengan formulasi: Jumlah evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu<br/>..... x 100 % Jumlah</p>   |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | evaluasi Raperdes APB Desea/Perubahan APB Desa |
|--|--|--|--|--|--|--|

| No | Indikator Kinerja Utama/ Individu                       | Keterlibatan dengan Komponen Perencanaan (Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan) | Target Tahun N-1 | Realisasi Tahun N-1 | Target Tahun N | Analisis/ Dasar Penetapan   |
|----|---|--|------------------|---------------------|----------------|---|
| 1  | Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                | 100%             | 100%                | 100%           | Pada tahun 2022 persentase rata - rata capaian kinerja aparatur Kecamatan Tembelang adalah 100% dikarenakan kinerja camat melebihi target untuk nilai Evaluasi AKIP, IKM dengan capaian 102,51%. Untuk target persentase rata-rata capaian kinerja aparatur pada tahun 2023 adalah 100%   |
| 2  | Nilai Paten Kecamatan                                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                  | 79               | 75,45               | 81             | Hasil nilai PATEN Kecamatan Tembelang tahun 2022 nilai PATEN Kecamatan Tembelang 75,45 (dengan tingkat capaian 94,31) dan tidak memenuhi target yang ditetapkan. Setelah dilaksanakan rapat internal penetapan target tahun 2023 nilai PATEN Kecamatan Tembelang ditargetkan 81, untuk mencapai target tersebut akan dilakukan upaya sebagai berikut:<br>1. Aspek Pemenuhan syarat teknis (Petugas Pelayanan): • Petugas pelayanan akan berseragam khusus dan rapi untuk peningkatan budaya kerja<br>2. Aspek Sarana dan Prasarana:<br>• Direncanakan pada PAK 2022 akan dilaksanakan pembangunan sarana parkir khusus pelayanan, taman edukasi dan bermain, toilet PATEN, pojok baca, papan nama utama, jalur difabel.<br>3. Aspek Pemenuhan syarat administratif: • Akan dibuatkan leaflet/ brosur profil pelayanan |
| 3  | Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                           | 100%             | 100%                | 100%           | Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan ditargetkan 100%, karena akan dilaksanakan kegiatan 1 kegiatan PHBN yaitu HUT RI pada Bulan Agustus dengan penghitungan sebagai berikut:<br>Jumlah kegiatan PHBN yang dilaksanakan<br>-----x100%<br>Jumlah kegiatan PHBN yang direncanakan   |
| 4  | Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                           | 100%             | 100%                | 100%           | Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti ditargetkan 100%, karena kegiatan rakor Forkopimcam yang direncanakan setiap tahun  |

|   |   |  |      |      |      |   |
|---|---|--|------|------|------|---|
|   |   |  |      |      |      | 4x akan menghasilkan rekomendasi yang ditindaklanjuti, dengan penghitungan sebagai berikut:<br>$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam}} \times 100\%$   |
| 5 | Persentase kegiatan sosial budaya yang ditindaklanjuti  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | N/A  | N/A  | 100% | Persentase kegiatan sosial budaya yang ditindaklanjuti ditargetkan 100% karena semua kegiatan sosial budaya yang dilimpahkan kewenangannya ke kecamatan akan ditindaklanjuti dengan formulasi penghitungan sebagai berikut:<br>$\frac{\text{Jumlah kegiatan sosial budaya yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kegiatan sosial budaya yang dievaluasi dan dimonitoring}} \times 100\%$   |
| 6 | Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 100% | 100% | 100% | Pada tahun 2023 Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait ditargetkan 100% dengan formulasi: Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait<br>$\frac{\text{Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada}}{\text{Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada}} \times 100\%$  |
| 7 | Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa                                     | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 100% | 100% | 100% | Pada tahun 2023 Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa ditetapkan target 100 % karena semua desa pasti melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDes dengan formulasi: Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDes<br>$\frac{\text{Jumlah Desa}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$  |
| 8 | Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 100% | 100% | 100% | Pada tahun 2023 Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti ditetapkan target 100 % karena dapat dipastikan semua desa menindaklanjuti hasil rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan APBDes, dengan formulasi:<br>$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$ |

|    |  |   |      |      |      |   |
|----|--|---|------|------|------|---|
|    |  |   |      |      |      | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa  |
| 9  | Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi              | PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN | 100% | 100% | 100% | Pada tahun 2023 Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi ditargetkan 100% karena semua pasti dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan, dengan formulasi: $\frac{\text{Jumlah Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi}}{\text{Jumlah Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa}} \times 100\%$ |
| 10 | Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif | PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN | 30   | 30   | 30   | Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif ditargetkan 30 lembaga (15 BUMDes+15 TP-PKKDesa)   |

PEJABAT PENILAI KINERJA/  
ATASAN LANGSUNG

HJ. MUNDJIDAH WAHAB

Jombang, 4 Januari 2023  
CAMAT TEMBELANG



**AGUS SANTOSO, S.Sos**  
Pembina/ IVa  
NIP.19730329 199201 1 001





**SASARAN KINERJA PECAAWAT  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

**KECAMATAN TEMBELANG**

**PERIODE PENILAIAN**

**01 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023**

| PEGAWAI YANG DINILAI |                      | PEJABAT PENILAI KINERJA |                                       |
|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 NAMA               | AGUS SANTOSO, S.Sos. | 1 NAMA                  | Drs. PURWANTO, M.KP.                  |
| 2 NTP                | 197303291992011001   | 2 NTP                   | 196612061989021002                    |
| 3 PANGKAT/GOL. RUANG | PEMBINA IV-d         | 3 PANGKAT/GOL. RUANG    | PEMBINA UTAMA MUDA IV-c               |
| 4 JABATAN            | CAMAT                | 4 JABATAN               | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN RAKYAT       |
| 5 UNIT KERJA         | KECAMATAN TEMBELANG  | 5 INSTANSI              | SEKRRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUMBANG |

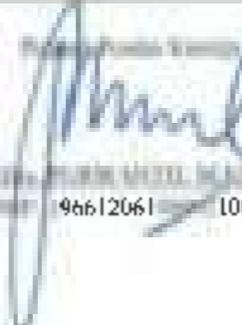
**RENCANA KERJA**

| NO              | RENCANA HASIL KERJA   | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU   | TARGET                   | PERSPEKTIF        |
|-----------------|---|--|--------------------------|-------------------|
| (1)             | (2)   | (3)  | (4)                      | (5)               |
| <b>A. UTAMA</b> |   |  |                          |                   |
| 1               | Rencana Hasil Kerja Utama 1<br>Pengimplementasian SAKIP yang membudaya di Kecamatan Tembelang (Penugasan dari Bupati)     | IKI 1.1<br>Nilai evaluasi AKIP Kecamatan Tembelang                             | Target 1.1<br>BB (72.01) | Penerima Internal |
| 2               | Rencana Hasil Kerja Utama 2<br>Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan kecamatan (Penugasan dari Bupati)        | IKI 2.1<br>IKM Kecamatan Tembelang   | Target 2.1<br>88,85      | Penerima Layanan  |
| 3               | Rencana Hasil Kerja Utama 3<br>Meningkatnya pelayanan publik sesuai standar (Penugasan dari Bupati)                       | IKI 3.1<br>IPP Kecamatan Tembelang   | Target 3.1<br>3,50       | Penerima Layanan  |
| 4               | Rencana Hasil Kerja Utama 4<br>Tidak adanya pelanggaran perda' perda' dan transkribum tepat waktu (Penugasan dari Bupati) | IKI 4.1<br>IKM Kecamatan Tembelang   | Target 4.1<br>100 %      | Penerima Layanan  |
| 5               | Rencana Hasil Kerja Utama 1<br>Pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu (Penugasan dari Bupati)          | IKI 5.1<br>Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu | Target 5.1<br>100 %      | Penerima Internal |
| 6               | Rencana Hasil Kerja Utama 2<br>Evaluasi Raperdes APBDesa Perubahan APBDesa tepat waktu (Penugasan dari Bupati)            | IKI 6.1<br>Persentase evaluasi Raperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa tepat waktu | Target 6.1<br>100 %      | Penerima Layanan  |
| 7               | Rencana Hasil Kerja Utama 3<br>Meningkatnya kinerja aparatur (Penugasan dari Bupati)                                      | IKI 7.1<br>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur                       | Target 7.1<br>100 %      | Penerima Internal |
| 8               | Rencana Hasil Kerja Utama 4<br>Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar (Penugasan dari Bupati)                           | IKI 8.1<br>Nilai PATEN Kecamatan   | Target 8.1<br>81         | Penerima Layanan  |

|  |   |  |                     |  |
|--|---|--|---------------------|--|
| 9  | Konsep Hasil Kerja (Nama)<br>Pembinaan P3HT/ P3BT yang dilaksanakan (Program dan Ruang)   | SK 11<br>Pembinaan P3HT/ P3BT yang dilaksanakan  | Tugas 1.1<br>100 %  | Penyerta Laporan                                     |
| 10   | Konsep Hasil Kerja (Nama)<br>Kecelakaan, keselamatan secara umum dan khusus (Program dan Ruang)   | SK 11.1<br>Pembinaan keselamatan Kebencanaan yang dilaksanakan   | Tugas 11.1<br>100 % | Penyerta Laporan                                     |
| 11   | Konsep Hasil Kerja (Nama)<br>Evaluasi faktor penyebab kecelakaan produksi dan tindakan yang harus dilakukan (Program dan Ruang)             | SK 11.1<br>Pembinaan laporan hasil pengamatan produksi/ kecelakaan dan tindakan yang dilaksanakan di industri tekstil      | Tugas 11.1<br>100 % | Penyerta Laporan                                     |
| 12   | Konsep Hasil Kerja (Nama)<br>Evaluasi pengorganisasian satuan APD (Ruang) (Program dan Ruang)   | SK 12<br>Pembinaan RSM yang melibatkan pengorganisasian satuan APDnya  | Tugas 12.1<br>100 % | Penyerta Laporan                                     |
| 13   | Konsep Hasil Kerja (Nama)<br>Evaluasi pelaksanaan dan pengamatan pelaksanaan APDnya (Program dan Ruang)                                     | SK 12.1<br>Pembinaan observasi hasil pelaksanaan dan pengamatan pelaksanaan APDnya yang dilakukan                          | Tugas 12.1<br>100 % | Penyerta Laporan                                     |
| 14   | Konsep Hasil Kerja (Nama)<br>Evaluasi dan penilaian pengamatan operasi secara umum dan spesifik (Program dan Ruang)                         | SK 14<br>Pembinaan operasi APDnya/ penilaian APDnya yang dilakukan   | Tugas 14.1<br>100 % | Pengantar Laporan                                    |
| 15   | Konsep Hasil Kerja (Nama)<br>Evaluasi dan penilaian strategi keselamatan kerja berdasarkan kecelakaan (Program dan Ruang)                   | SK 15<br>Penyerta Laporan/Revisi/ Tindakan Pencegahan Kecelakaan (RSM) yang dibuat   | Tugas 15.1<br>100 % | Penyerta Laporan                                     |
| 16   | Konsep Hasil Kerja (Nama)<br>Program pelatihan sesuai Perintah Kerja Kelengkapan (Program dan Ruang)  | SK 16<br>Revisi program Keselamatan Tertinggi Tahap 500  | Tugas 16.1<br>100 % | Program  |
| 17   | Konsep Hasil Kerja (Nama)<br>Terdokumentasi dan/atau program sesuai dengan ketentuan dan metode yang ditetapkan (Program dan Ruang)         | SK 17<br>Pembinaan strategi keselamatan Ruang yang dilakukan tingkat Dasar   | Tugas 17.1<br>100 % | Formulir   |
| <b>B. TAMBAHAN</b>   |   |  |                     |  |
| 1  | Konsep Hasil Kerja Tambahan 1<br>Materi yang ditambahkan sesuai dengan kondisi (Program dan Ruang) sesuai dengan (Program dan Ruang) sesuai | SK 1.1   | Tugas 1.1           | Penyerta Laporan Formulir sesuai (Program dan Ruang) |
| <b>PERAKTIFAN</b>  |   |  |                     |  |
| 1. Berikanlah jawaban:<br>Mendapat apa tersebut kemudian susunlah:<br>Bentuk, ukuran, warna, dan juga susunlah:<br>Mendapat jawaban yang benar |   | Jawaban: Sesuai Program<br>Terlihat terlihat sesuai dan yang lain<br>baik tahun dan susunan untuk perbaikan yang dilakukan |                     |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 2 | <p><b>Akuntabel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul> | <p><b>Ekspetasi Khusus Pimpinan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berani berterus terang dan mengakui kesalahan</li> <li>- Mengadi role model/pusat dalam menjunjung komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerjanya</li> </ul>    |
| 3 | <p><b>Kompetensi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>   | <p><b>Ekspetasi Khusus Pimpinan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktif mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang diadakan internal maupun eksternal</li> </ul>  |
| 4 | <p><b>Manusiawi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Merbentuk lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>  | <p><b>Ekspetasi Khusus Pimpinan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder</li> <li>- Sifat menawarkan bantuan tanpa harus diminta terlebih dahulu</li> </ul> |
| 5 | <p><b>Integritas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meneguh pegu ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>                                     | <p><b>Ekspetasi Khusus Pimpinan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> </ul>   |
| 6 | <p><b>Adaptif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>  | <p><b>Ekspetasi Khusus Pimpinan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengimplementasikan perkembangan teknologi untuk memperbaiki metode dan proses kerja.</li> </ul>  |
| 7 | <p><b>Kolaboratif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>                                     | <p><b>Ekspetasi Khusus Pimpinan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk menyampaikan ide atau gagasan yang membangun</li> </ul>   |

Ditandatangani  
  
 NIP. 197303 11001

Ditandatangani  
  
 NIP. 196612061 1002

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

PERIODE PENILAIAN:

01 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023

KECAMATAN TEMBELANG

**DUKUNGAN SUMBER DAYA**

- 1 Dibutuhkan kursi, laptop dan printer serta sarana IT yang memadai
- 2 Dibutuhkan dukungan pegawai yang memahami IT
- 3 Dibutuhkan anggaran yang sesuai dengan DPA OPD untuk pelaksanaan kegiatan
- 4 Dibutuhkan diklat dan pelatihan yang memadai bagi para pegawai
- 5 Dibutuhkan koordinasi dengan OPD terkait
- 6 Pendampingan dan monitoring pimpinan

**SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN**

- 1 Laporan kinerja disampaikan setiap triwulan melalui monitoring dan evaluasi rencana aksi pencapaian kinerja
- 2 Meningkatkan nilai AKIP Kecamatan dan pelayanan publik kepada masyarakat

**KONSEKUENSI**

- 1 Apabila memenuhi ekspektasi Pimpinan maka akan meningkatkan kinerja pegawai sekaligus kinerja OPD
- 2 Apabila tidak memenuhi ekspektasi Pimpinan maka siap menerima teguran

Jombang, 02 JANUARI 2023

Pegawai yang Dinilai

  
NIP. 19700101011001

Penilai Kinerja

  
NIP. 19661201019021002

EVALUASI KINERJA PECAAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

PERIODE: TRIWULAN ~~KEEMPAT~~ AKHIR

| KECAMATAN TEMBELANG                |  |   | PERIODE PENILAIAN |                         | 01   | SD 31 DESEMBER TAHUN 2023  |
|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------------|--|--|
| NO.                                | PECAAWAI YANG DINILAI  |   | NO.               | PEJABAT PENILAI KINERJA |  |  |
| 1                                  | NAMA   | AGUS SANTONO, S.Sos.  | 1                 | NAMA                    | Drs. PURWANTO, M.KP                          |  |
| 2                                  | NIP  | 197303291992011001  | 2                 | NIP                     | 196612061982021092                           |  |
| 3                                  | PANGKAT/GOL. RUANG   | PEMBINA/IV-a  | 3                 | PANGKAT/GOL. RUANG      | PEMBINA UTAMA MUDA/IV-c                      |  |
| 4                                  | JABATAN  | CAMAT   | 4                 | JABATAN                 | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESIAHPEHAAN RAKYAT |  |
| 5                                  | UNIT KERJA   | KECAMATAN TEMBELANG   | 5                 | INSTANSI                | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOMBANG         |  |
| <b>CAPAIAN KINERJA ORGANISASI*</b> |  |   |                   |                         |  |  |
| BAIK                               |  |   |                   |                         |  |  |
| HASIL KERJA                        |  |   |                   |                         |  |  |
| NO.                                | RENCANA HASIL KERJA  | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU  | TARGET            | PERSPEKTIF              | REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG           | UMPMAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG  |
| (1)                                | (2)  | (3)   | (4)               | (5)                     | (6)  | (7)  |
| <b>A. UTAMA</b>                    |  |   |                   |                         |  |  |
| 1                                  | Rencana Hasil Kerja Utama 1<br>Pengimplementasian SAKIP yang membudhny di Kecamatan Tembelaug (Penugasan dari Bupati)        | IKI. 1.1<br>Nilai evaluasi AKIP Kecamatan Tembelaug                             |                   | Penguatan Internal      |  | Belum ada penilaian AKIP pada tribulan I   |
| 2                                  | Rencana Hasil Kerja Utama 2<br>Meningkatkany kepinas masyarakat pengguna layanan Kecamatan Tembelaug (Penugasan dari Bupati) | IKI. 2.1<br>IKM Kecamatan Tembelaug   |                   | Penerima Layanan        |  | Belum ada penilaian IKM pada tribulan I  |
| 3                                  | Rencana Hasil Kerja Utama 3<br>Meningkatkany pelayanan publik sesuai standar (Penugasan dari Bupati)                         | IKI. 3.1<br>IPP Kecamatan Tembelaug   |                   | Penerima Layanan        |  | Belum ada penilaian IPP pada tribulan I  |
| 4                                  | Rencana Hasil Kerja Utama 4<br>Tidak adanya pelanggaran perfa/ pekada dan trambuh tepat waktu (Penugasan dari Bupati)        | IKI. 4.1<br>IKM Kecamatan Tembelaug   | 25%               | Penerima Layanan        | 25%  | Pimpinan: Laporkan secara rutin kasus trambuh yang terjadi dan lakukan koordinasi secara tepat dan cepet dengan instansi terkait untuk penanganan gangguan trambuh yang lebih serius |
| 5                                  | Rencana Hasil Kerja Utama 1<br>Pelapran perfa/ anban realisasi APBDes tepat waktu (Penugasan dari Bupati)                    | IKI. 5.1<br>Persentase laporm perfa/ anban realisasi APBDesa tepat waktu        | 50%               | Penguatan Internal      | 50%  | Pimpinan: Selalu gantap dan dampy proses pertanggungjawaban realisasi APBDes untuk memenuh target realisasi sesuai dengan jadwal yang ada  |
| 6                                  | Rencana Hasil Kerja Utama 2<br>Evaluasi Raperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa tepat waktu (Penugasan dari Bupati)              | IKI. 6.1<br>Persentase evaluasi Raperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa tepat waktu | 50%               | Penerima Layanan        | 50%  | Pimpinan: Dnringi setiap proses kegiatan yang ada dan evaluasi sesuai dengan aturan yang berlaku   |
| 7                                  | Rencana Hasil Kerja Utama 3<br>Meningkatkany kinerja aparatur (Penugasan dari Bupati)  | IKI. 7.1<br>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur                       |                   | Penguatan Internal      |  | Untuk capaian kinerja akan dihitung pada akhir tahun berdasarkan capaian kinerja akhir tahun dari masing-masing pegawai  |
| 8                                  | Rencana Hasil Kerja Utama 4<br>Meningkatkany PATEN sesuai dengan standar (Penugasan dari Bupati)                             | IKI. 8.1<br>Nilai PATEN Kecamatan   |                   | Penerima Layanan        |  | Belum ada penilaian PATEN pada tribulan I  |

|   |  |   |      |                 |      |   |
|---|--|---|------|-----------------|------|---|
| 9   | Asesmen Hasil Kerja Utama 1<br>Kemampuan Menganalisis PISA yang ditunjukkan (Program dan Ruang)                    | 02.11.1<br>Kemampuan Menganalisis PISA yang ditunjukkan                         | 0    | Asesmen Laporan | 0    | 100% di pertanggungjawabkan oleh MIPA/IPS yang ditunjukkan pada (tabel)   |
| 10  | Asesmen Hasil Kerja Utama 2<br>Kemampuan berkolaborasi secara tim dalam melakukan (Program dan Ruang)              | 02.11.1<br>Kemampuan berkolaborasi Partisipasi yang ditunjukkan                 | 25%  | Asesmen Laporan | 25%  | Asesmen: Kemampuan berkolaborasi yang ditunjukkan oleh siswa dengan menunjukkan kontribusi di kelompok/kelas                    |
| 11  | Asesmen Hasil Kerja Utama 3<br>Kemampuan berkolaborasi secara tim dalam melakukan (Program dan Ruang)              | 02.11.1<br>Kemampuan berkolaborasi Partisipasi yang ditunjukkan                 | 25%  | Asesmen Laporan | 25%  | Asesmen: Kemampuan berkolaborasi yang ditunjukkan oleh siswa dengan menunjukkan kontribusi di kelompok/kelas                    |
| 12  | Asesmen Hasil Kerja Utama 4<br>Kemampuan menggunakan media digital dalam (Program dan Ruang)                       | 02.11.2<br>Kemampuan menggunakan media digital dalam (Program dan Ruang)        | 10%  | Asesmen Laporan | 10%  | Asesmen: Kemampuan menggunakan media digital yang ditunjukkan oleh siswa dengan menunjukkan kontribusi di kelompok/kelas        |
| 13  | Asesmen Hasil Kerja Utama 5<br>Kemampuan berkolaborasi secara tim dalam melakukan (Program dan Ruang)              | 02.11.1<br>Kemampuan berkolaborasi Partisipasi yang ditunjukkan                 | 10%  | Asesmen Laporan | 10%  | Asesmen: Kemampuan berkolaborasi yang ditunjukkan oleh siswa dengan menunjukkan kontribusi di kelompok/kelas                    |
| 14  | Asesmen Hasil Kerja Utama 1<br>Kemampuan dan ketelitian menggunakan aplikasi word dalam (Program dan Ruang)        | 02.11.1<br>Kemampuan menggunakan aplikasi word dalam (Program dan Ruang)        | 10%  | Asesmen Laporan | 10%  | Asesmen: Kemampuan menggunakan aplikasi word yang ditunjukkan oleh siswa dengan menunjukkan kontribusi di kelompok/kelas        |
| 15  | Asesmen Hasil Kerja Utama 4<br>Kemampuan dan ketelitian menggunakan aplikasi excel dalam (Program dan Ruang)       | 02.11.1<br>Kemampuan menggunakan aplikasi excel dalam (Program dan Ruang)       | 10%  | Asesmen Laporan | 10%  | Asesmen: Kemampuan menggunakan aplikasi excel yang ditunjukkan oleh siswa dengan menunjukkan kontribusi di kelompok/kelas       |
| 16  | Asesmen Hasil Kerja Utama 2<br>Program pemrosesan secara otomatis dan kemampuan (Program dan Ruang)                | 02.11.1<br>Kemampuan menggunakan aplikasi excel dalam (Program dan Ruang)       | 25%  | Asesmen Laporan | 25%  | Asesmen: Kemampuan menggunakan aplikasi excel yang ditunjukkan oleh siswa dengan menunjukkan kontribusi di kelompok/kelas       |
| 17  | Asesmen Hasil Kerja Utama 3<br>Kemampuan dan ketelitian menggunakan aplikasi power point dalam (Program dan Ruang) | 02.11.1<br>Kemampuan menggunakan aplikasi power point dalam (Program dan Ruang) | 25%  | Asesmen Laporan | 25%  | Asesmen: Kemampuan menggunakan aplikasi power point yang ditunjukkan oleh siswa dengan menunjukkan kontribusi di kelompok/kelas |
| <b>5. Penutup</b>                                       |  |   |      |                 |      |   |
| 1   | Asesmen Hasil Kerja Utama 1  | 02.11.1   | 100% | Asesmen Laporan | 100% |   |
| <b>REVISI HASIL BELAJAR</b><br><b>REVISI KEMUNDURAN</b> |  |   |      |                 |      |   |



**EVALUASI KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

PERIODE: TRIWULAN III/2023-**AKHIR**

| KECAMATAN TEMBELANG |                      |                     | PERIODE PENILAIAN |                         | 01 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2023         |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|--|
| NO                  | PEGAWAI YANG DINILAI |                     | NO                | PEJABAT PENILAI KINERJA |  |
| 1                   | NAMA                 | AGUS SANTOSO S.Sos. | 1                 | NAMA                    | Drs. PURWANTI, M.KP                          |
| 2                   | NIP                  | 197303291992011001  | 2                 | NIP                     | 196612061949021002                           |
| 3                   | PANGKAT/GOL. RUANG   | PELAKSANA IV-p      | 3                 | PANGKAT/GOL. RUANG      | PEMUDA MUDA IV-c                             |
| 4                   | JABATAN              | CAMAT               | 4                 | JABATAN                 | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESUKSESRAAN RAKYAT |
| 5                   | UNIT KERJA           | KECAMATAN TEMBELANG | 5                 | INSTANSI                | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG         |

**CAPAIAN KINERJA ORGANISASI\***

**BAK**

**POLA DISTRIBUSI:**



| HASIL KERJA     |  |  |        |                    |                                    |  |
|-----------------|--|--|--------|--------------------|------------------------------------|--|
| NO              | RENCANA HASIL KERJA  | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU                         | TARGET | PERSPEKTIF         | REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG | UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG |
| 1.              |  |  | (4)    | (3)                | (6)                                | (7)  |
| <b>A. UTAMA</b> |  |  |        |                    |                                    |  |
| 1               | Rencana Hasil Kerja Utama 1<br>Pengimplementasian SAKIP yang membidangi di Kecamatan Tembelang (Penugasan dari Bupati) | IKI 1.1<br>Nilai evaluasi AKIP Kecamatan Tembelang | —      | Pengnotan Internal |                                    | Belum ada penilaian AKIP pada triwulan I           |
| 2               | Rencana Hasil Kerja Utama 2<br>Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan kecamatan (Penugasan dari Bupati)     | IKI 2.1<br>IKM Kecamatan Tembelang                 | —      | Pengnotan Layanan  |                                    | Belum ada penilaian IKM pada triwulan I            |
| 3               | Rencana Hasil Kerja Utama 3<br>Meningkatnya pelayanan publik sesuai standar (Penugasan dari Bupati)                    | IKI 3.1<br>IPP Kecamatan Tembelang                 | —      | Pengnotan Layanan  |                                    | Belum ada penilaian IPP pada triwulan I            |



|    |   |  |     |               |     |  |
|----|---|--|-----|---------------|-----|--|
| 16 | Rencana Hasil Kerja Utama 2<br>Program pemangjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang (Penggunaan dari Bupati) | IKL 16.1<br>Realisasi anggaran Kecamatan Tebelang Tahun 2025                     | 25% | Anggaran      | 10% | Pemetaan. Perbaiki mtak kedepannya lebih baik dan bisa mencapai realisasi sebesar 100 %                          |
| 17 | Rencana Hasil Kerja Utama 2<br>Program pemangjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang (Penggunaan dari Bupati) | IKL 17.1<br>Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati yang dibetukna kepada Camat | 25% | Proses Bisnis | 25% | Pimpinan. Proses penyusunan dokumen dan padulomnya smlh sesuai dengan eksploitasi Pertahanan dan limgkatkan lagi |

#### B. TAMBAHAN

|   |                                |         |            |  |  |  |
|---|--------------------------------|---------|------------|--|--|--|
| 1 | Rencana Hasil Kerja Tambahan 1 | IKL 1.1 | Target 1.1 | (Penerima Layanan/<br>Proses Bisnis/<br>Pengujian Internal/<br>Anggaran) |  |  |
|---|--------------------------------|---------|------------|--|--|--|

#### REVISI HASIL KERJA\*

#### SESUAI EKSPEKTASI

| REVISI HASIL KERJA |  | UMPAK DARI BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG |   |   |
|--------------------|--|---|---|---|
| 1                  | <b>Berorientasi Masyarakat</b><br>- Memahami dan memahami kebutuhan masyarakat<br>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan<br>- Melakukan perbaikan tiada henti   |   | <b>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</b><br>- Terbuka terhadap masukan dari orang lain<br>- Selalu belajar dari kesalahan untuk perbaikan kinerja   | Pimpinan: Lakukan perbaikan terus menerus untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat   |
| 2                  | <b>Berprestasi</b><br>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi<br>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, etis, dan efisien<br>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan                                  |   | <b>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</b><br>- Berani bertecus terang dan mengakui kesalahan<br>- Menjadi role model/ panutan dalam mendorong komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerjanya | Pimpinan: Selalu menjadi contoh untuk pegawai dibawahnya dan selalu bijaksana dalam berpolitik  |
| 3                  | <b>Berprestasi</b><br>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah<br>- Membantu orang lain belajar<br>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik   |   | <b>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</b><br>- Aktif mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang diadinkau   | Pimpinan: Sebagai pimpinan harus menjadi role model dalam pengembangan diri dan tingkaskan kompetensi terus menerus                             |
| 4                  | <b>Harmonis</b><br>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya<br>- Suka menolong orang lain<br>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif  |   | <b>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</b><br>- Membina komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder  | Pimpinan: Selalu kedepankan koordinasi yang baik dengan semua pihak baik instansi terkait maupun masyarakat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari |
| 5                  | <b>Loyal</b><br>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah<br>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara<br>- Menjaga rahasia jabatan dan negara |   | <b>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</b><br>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara  | Pimpinan: Berani bertecus jawab terhadap apa yang dilakukan dan selalu menjaga nama baik instansi dan Pemerintah Daerah pada umumnya            |